

Demokrasi di Indonesia: ANTARA PATRONASE DAN POPULISME

Ringkasan Eksekutif

Power, Welfare, and Democracy Project

Tim Peneliti UGM:

Amalinda Savirani (Koordinator);
Debbie Prabawati, Eric Hiariej, Hasrul Hanif, Purwo Santoso,
Rita Kartika Sari, Wening Hapsari M, Willy Purna Samadhi

Tim Peneliti University of Oslo:

Olle Törnquist, Kristian Stokke,

Tim Peneliti Lokal:

28 Koordinator lokal (*key informants*)
117 asisten peneliti di 30 Kabupaten/Kota

Kerja sama

Universitas Gadjah Mada dengan University of Oslo

Didukung oleh

Kementerian Luar Negeri Norwegia
(Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta)



Dengan Diterbitkannya Laporan Eksekutif ini,
maka laporan sebelumnya yang berjudul:

Ringkasan Eksekutif

Hasil Survei Demokrasi

(Baseline Survey Democracy)

Power, Welfare and Democracy (PWD)

Universitas Gadjah Mada dan University of Oslo

Penulis:

Amalinda Savirani, MA; Prof. Dr. Olle Törnquist,

Dr. Eric Hiariej, Mphil. dan Hasrul Hanif, MA

dinyatakan tidak berlaku.



Ucapan Terimakasih

Laporan eksekutif ini merupakan produk awal dari kegiatan *assessment* demokrasi Indonesia yang diselenggarakan dalam *Power, Welfare dan Democracy Project*. Persiapan penyusunan laporan komprehensif saat ini tengah berlangsung. Paralel dengan kegiatan itu, sejumlah kajian pendalaman dan berbagai upaya pemanfaatan temuan-temuan untuk memperkuat advokasi demokrasi juga sedang berlangsung.

Banyak pihak yang terlibat namun juga ada banyak peran yang menjadikan kegiatan yang boleh dibilang kolosal ini berlangsung. Disamping dipayungi oleh kerjasama antara Universitas Gadjah Mada (dalam hal ini Jurusan Politik dan Pemerintahan) dan University of Oslo, kegiatan *assessment* ini juga melibatkan simpul-simpul jejaring aktivis pro-demokrasi dari berbagai daerah di tanah air, baik yang berbasis di universitas maupun dan Organisasi Non-Pemerintah. Berkat kerja keras dan kerjasama yang didedikasikan, dan juga berkat kepemimpinan *Project Director* Amalinda Savirani, laporan eksekutif ini bisa sampai di tangan pembaca. Kepada mereka disampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Adapun peran dan jasa mereka adalah sebagai berikut.

Dari sisi substansi (kerangka pengkajian) *assessment* ini mengacu pada, dan sekaligus mengembangkan, kerangka pengkajian yang telah dipakai dalam *assessment* yang diselenggarakan *Demos*, menghasilkan dua buku: (1) *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia (2005)*; (2) *Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia, (2009)*. Laporan dari kegiatan *assessment* demokrasi ini boleh disebut sebagai ide dasar untuk penulisan laporan "putaran ketiga". Ketiganya ditulis di atas keinginan untuk mengukur kemajuan demokratisasi di Indonesia dari waktu ke waktu.

Tokoh yang ikut mengawal ketersambungan laporan-laporan ini adalah Professor Olle Törnquist dari University of Oslo. Selain ikut meletakkan kerangka pikir dalam studi-studi terdahulu, ia terlibat secara intensif dalam rangkaian panjang diskusi diskusi penyusunan instrumen, pengolahan dan analisis data serta menyusun naskah laporan ini. Selain itu, Willy Purna Samadhi dan Debbie Prabawati, yang juga terlibat dalam penelitian sebelumnya, ikut memperkuat *assessment* "putaran ketiga" ini.

Pengembangan lebih lanjut dari kerangka pikir dan penerapannya hingga tersajinya kajian ini, dilakukan bersama dalam tim yang berbasis di UGM (Amalinda Savirasi, Debbie Prabawati, Eric Hiariej, Hasrul Hanif, dan Purwo Santoso, dengan dibantu oleh Rita Kartika Sari, Wening Hapsari M.); dan tim yang berbasis di University of Oslo (Olle Törnquist dan Kristian Stokke); serta jejaring di berbagai daerah.

Assessment ini pada dasarnya menggunakan Kabupaten/Kota sebagai unit analisis, meskipun dilengkapi juga dengan sejumlah data yang menggunakan unit analisis berskala nasional. Studi ini melibatkan 28 orang koordinator lapangan (*key informant*) yang secara penuh bertanggung jawab dan berkoordinasi para asisten peneliti lokal. Mereka adalah: T.M Jafar (Banda Aceh), Aryos Nivada (Aceh Selatan), Benget Silitonga (Medan), M. Irfan

(Batam), Priyono Prawito (Bengkulu), Kasmadi Kasyim (Kerinci), Syafaruddin (Lampung Selatan), Caroline Paskarina (Bandung), Widiyanto (DKI Jakarta), AH Mafthuchan (Bekasi & Tangerang), Hasrul Hanif (DI Yogyakarta), Akhmad Ramdhon (Surakarta), Wachyu Ardiyanto (Batang), Alfi Satiti (Pekalongan), Aan Anshori (Sidoarjo & Surabaya), I Made Anom Wiranata (Badung), Viza Juliansyah (Pontianak), Noorhalis Majid (Banjarmasin), Didik Hadiyatno (Balikpapan), Lutfi Wahyudi (Kutai Kartanegara), M. Imran (Makassar), Welly Waworundeng (Manado), Nur Alamsyah (Poso), Ridha Ajam (Ternate), Jusuf Madubun (Ambon), Otto Madung (Belu), Rudi Rohi (Kupang), dan Aprila R. Amelia Wayar (Jayapura). Kepada mereka juga disampaikan terima kasih yang mendalam.

Pengumpulan data melibatkan 117 orang peneliti lokal yang berada dalam arahan koordinator. Mereka mengumpulkan data dari 628 informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan mendalam dalam 14 yang hendak didalami, tersebar di 30 kabupaten/kota di 24 provinsi di Indonesia. Masing-masing informan ini telah meluangkan waktu, pikiran dan dedikasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan waktu 8-12 jam. Terima kasih disampaikan secara tulus kepada para beliau, yang karena pertimbangan teknis, tidak dicantumkan di sini. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi penghargaan jasa dan dedikasi mereka.

Dalam proses penyusunan instrumen dan analisis pasca pengambilan data lapangan kami dibantu secara penuh secara substansi dan metodologis melalui forum *reference group*. Aktivitas ini melibatkan kawan-kawan yang *expert* di masing-masing *frontline* dan memberikan sumbangan perspektif berharga untuk menyempurnakan survei ini. Mereka adalah AE Priyono, Danang Widoyoko, Daniel Dhakidae, Mochtar Mas' oed, Surya Tjandra, Usman Hamid, dan Otto Samsudin Ishak, Tamrin Tamagola, Ikrar Nusa Bhakti, Eva Kusuma Sundari, Wardah Hafidz, Wiladi Budi Harga, Handoko, Luki Djani, Mian Manurung.

Beberapa kolega kami di Fisipol UGM juga terlibat dalam pekerjaan ini dengan memberi masukan terhadap instrumen survei dan membantu para kawan-kawan di lapangan dalam training yang bertujuan menyamakan persepsi terhadap survei ini. Maka terima kasih mendalam kami sampaikan kepada Poppy Winanti, Suharko, Bevaola Kusumasari, Riza Nur Arfani, Samsu Rizal Panggabean, Mada Sukmajati, Gabriel Lele, dan Kuskridho Ambardi.

Kami juga berterima kasih kepada Rektor UGM Pratikno, kantor Urusan Internasional Rio Rini Diah Moehkardi, Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto yang memberi dukungan penuh terhadap aktivitas riset ini. Secara khusus kami perlu mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat kami di *In Search Balance (ISB)* dan Pacer yang memayungi seluruh aktivitas ini. Termasuk orang-orang yang berada di *The Royal Norwegian Embassy*. Tidak lupa terima kasih juga kami sampaikan kepada pengelola beserta seluruh warga Jurusan Politik dan Pemerintahan; tidak terkecuali Indah Nur Hasita dan Silvi Ratnasari yang dengan tekunnya mengadministrasikan keuangan proyek ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami tetap mengharapkan masukan, saran, dan komentar untuk penyempurnaan kegiatan survei yang akan datang.

Kata Pengantar

Sebagaimana disarankan David Beetham (1999), demokrasi adalah persoalan kontrol populer terhadap urusan publik dan politik berbasis persamaan hak dan warganegara. Kajian yang disajikan dalam laporan ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh hal itu berlaku di Indonesia. Pengukuran demokrasi ini dilakukan dari perspektif tersebut, dengan menelaah manifestasinya dalam 13 frontline isu. Data-data survei dihimpun dari informan aktivis pro-demokrasi yang merupakan *expert* di bidang dan lapangannya masing-masing.

Perlu diketahui bahwa survei ini merupakan awalan dari pekerjaan yang lebih besar lagi di bawah payung riset *Power, Welfare dan Democracy (PWD)*, sebuah proyek yang bernaung di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, bekerjasama dengan *University of Oslo*, dan didanai oleh *The Norwegian Ministry of Foreign Affairs*. Stok data dan informasi yang didapatkan dari survei diharapkan akan menjadi pintu masuk bagi; *pertama*, memperbaharui data tentang situasi perkembangan demokrasi di Indonesia. *Kedua*, hasil analisis survei ini dapat menjadi panduan bagi akademisi, mahasiswa, *experts*, jurnalis, politis untuk memetakan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan demokrasi. *Ketiga*, data dari hasil survei dapat dijadikan acuan bagi para mahasiswa master dan doktoral untuk mendorong aktivitas riset lebih lanjut. *Keempat*, aktivitas ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran bagaimana transformasi demokrasi berkontribusi memfasilitasi tumbuhnya representasi populer dan mendorong kesejahteraan yang berkesinambungan di level masyarakat. Kelima, dalam jangka pendek hasil survei ini dapat dijadikan bahan untuk membekali pengetahuan tentang masalah kekuasaan dan kesejahteraan menghadapi pemilu legislatif dan presiden tahun 2014.

Sebagai informasi, Survei Perkembangan Demokrasi di Indonesia 2013 merupakan pondasi dalam penyelenggaraan tiga aktivitas lain di bawah payung *Power, Welfare and Democracy*. *Pertama*, tiga *sub-project* studi kasus tematik yang merupakan riset lanjutan berdasar temuan lapangan survei. Ketiga riset tersebut masing-masing mengambil tema citizenship, welfare regime, dan local regime. *Kedua*, aktivitas pendidikan mahasiswa master dan doktoral baik pembelajaran di kelas maupun tugas akhir yang didanai oleh skema beasiswa PWD. Ketiga, aktivitas jejaring dalam bentuk publikasi, *cadre course*, kerjasama training, workshop, maupun pelatihan dalam rangka penguatan basis masyarakat sipil, khususnya untuk tujuan mempengaruhi kebijakan dan advokasi.

Survei ini dapat terselenggara dengan baik berkat sinergi banyak pihak mulai dari proses penyusunan instrumen, pengambilan data di lapangan, hingga proses pengolahan dan analisis data. Sepanjang proses itu kami mendapat masukan berharga dari berbagai pihak menyangkut sisi metodologis, substansi, dan teknis. Maka dari itu, hasil survei ini selayaknya dikembalikan kepada publik dalam rangka mendorong kemajuan demokrasi di Indonesia.

Executive summary ini adalah catatan awal yang merangkum secara umum temuan lapangan survei. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi terhadap aktivitas ini. Kami membuka peluang terhadap komentar, masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tidak hanya *executive summary* ini, tapi keseluruhan aktivitas riset kami. Besar harapan kami semoga survei ini dapat menginspirasi banyak pihak melakukan riset lanjutan yang lebih komprehensif, dan memantik banyak pihak untuk melakukan advokasi dalam rangka mendorong demokrasi ke arah yang lebih baik.

Salam,

Purwo Santoso
Program Director PWD

Ringkasan Eksekutif

Demokrasi di Indonesia: ANTARA PATRONASE DAN POPULISME

A. Pengantar

Power, Welfare dan Democracy (PWD) merupakan riset lanjutan yang berdurasi jangka panjang dengan tujuan mendukung proses demokrasi di Indonesia secara strategis dan kritis. Ia bersifat strategis karena menurut kami demokrasi di Indonesia harus bertahan kokoh ke depan dan bersifat kritis karena salah satu asumsi dari penelitian ini adalah bahwa ada kerumitan dalam proses demokrasi prosedural yang saat ini diterapkan, dan kerumitan tersebut memiliki peluang untuk mengembalikan Indonesia ke dalam jurang otoritarianisme.

Demokrasi harus berujung pada upaya peningkatan kesejahteraan. Demokrasi elektoral di Indonesia saat ini telah berhasil menjamin hak sipil dan hak politik. Tapi itu saja tidak cukup untuk mendorong demokrasi tersambung pada kesejahteraan. Untuk dapat mengkaitkan demokrasi dan kekuasaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi; a) siapa aktor yang berada di kekuasaan yang memiliki akses untuk mengontrol institusi demokrasi (“Institusi” di sini adalah aturan main atau norma demokrasi yang universal); b) bagaimana cara aktor mengontrol institusi demokrasi ini; c) apa yang mereka anggap sebagai isu “publik”, d) bagaimana kapasitas negara untuk mengurus dan menyelesaikan isu publik dengan cara yang bersih; dan e) bagaimana cara demokratis dapat menyumbang (atau tidak) untuk memecahkan masalah kaitan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi berbasis kesejahteraan yang berkelanjutan.

Untuk memahami kaitan dinamis antara demokrasi dan kesejahteraan ini, ada tiga cara kami melakukan riset ini; *pertama* menetapkan agenda kritis demokrasi berdasarkan survei terhadap aktor demokrasi; *kedua*, memperkuat gerakan pro demokrasi dalam aspek penelitian dan kompetensi analitis mereka; dan *ketiga* mengembangkan interaksi dan *engagement* antara elemen masyarakat sipil dalam isu hak asasi manusia dan demokrasi.

B. Metode Survei

Tujuan survei ini adalah mengevaluasi tantangan dan peluang demokrasi di Indonesia berbasis pada kerangka David Beetham sebagai pijakan dasar. Beetham mendefinisikan demokrasi sebagai “kontrol populer terhadap urusan publik dan politik berbasis persamaan hak warganegara” (Beetham, 1999). Survei ini merupakan komponen dasar riset PWD ini.

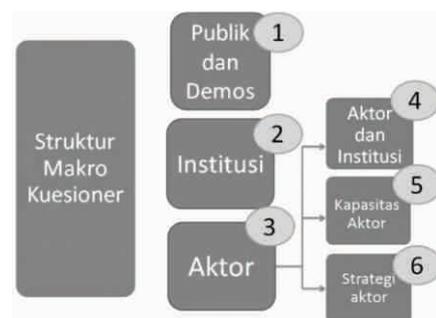
Berbeda dengan jenis penaksiran demokrasi yang pernah ada, yang pada umumnya bertujuan untuk memahami perilaku politik pemilih menjelang momentum politik dan kebanyakan bersifat *check-list*, survei ini bersifat kualitatif melalui in-depth interview yang panjang (6–8 jam per informan). Kepada informan, kami bertanya serangkaian hal yang terkait dengan

teori-teori dasar demokrasi (lihat Törnquist 2013) untuk mengetahui apa kelompok teori yang paling inklusif dan tanpa bias dengan menjawab lima kelompok pertanyaan di bawah ini:

- i. Apakah institusi demokrasi (aturan main demokrasi) seperti kebebasan dan pemilu mendorong lahir dan bekerjanya demokrasi?
- ii. Apakah para aktor menggunakan institusi demokrasi tersebut?
- iii. Apakah orang kebanyakan menerima dan memahami apa yang dimaksud sebagai isu “publik” dan apa saja komponen isu “publik” tersebut ?
- iv. Apa kapasitas aktor “dominan” dan “alternatif” untuk menggunakan institusi demokrasi (aturan main demokrasi) dalam rangka mengembangkan alternatif cara bermain politik dan produk kebijakan?
- v. Bagaimana politik dan produk kebijakan tersebut berdampak pada pengembangan demokrasi dan sejauhmana ia berdampak pada kesejahteraan?

Grafik 1 memperlihatkan secara visual alur kelompok pertanyaan

Grafik 1
Struktur Makro Kuesioner



Survei jenis ini telah terselenggara sebanyak dua kali: 2003/2004 dan 2007. Kedua survei terdahulu diselenggarakan oleh Demos dan University of Oslo. Dalam putaran ketiga ini, UGM dan UiO bersama-sama dengan tim di tingkat lokal di 28 kota/kabupaten dan 2 daerah istimewa dan melibatkan 28 koordinator lokal (key informant) dan 147 peneliti. Total informant (narasumber) adalah sebanyak 592 orang. Ada dua level survei yang dilakukan yakni di tingkat lokal dan tingkat pusat. Ringkasan eksekutif ini adalah hasil dari survei di tingkat lokal.

Ada empat kategori yang digunakan untuk memilih 30 daerah survei; *pertama*, letak geografisnya—Jawa, Sumatera, dan Bali serta daerah di luar itu. *Kedua*, proses dan tingkat pembangunan ekonomi—daerah industri dan non industri. *Ketiga*, tingkat integrasi sosial—apakah daerah yang memiliki sejarah konflik komunal atau merupakan daerah yang harmonis. *Keempat*, keberadaan aktivitas masyarakat sipil yang aktif mempromosikan kegiatan pro demokrasi.

Informan survei adalah aktor pro-demokrasi yang duduk di posisi strategis dalam organisasinya dan aktif mempromosikan demokrasi di sektor dan daerahnya masing-masing. Tim menempuh tiga tingkatan untuk memilih informan; *pertama*, kami meminta *key informant* untuk memilih 3–5 isu/sektor yang dominan di daerahnya. *Kedua*, Tim UGM bersama dengan *key informant* menyediakan 3–5 nama informan di masing-masing sektor. *Ketiga*, mengevaluasi sektor dan nama informan dengan mempertimbangkan keseimbangan proporsi umur, gender, level pendidikan, dan latar belakang.

Tabel 1 Kelompok Umur Informan

No	Kelompok Umur	Persentase
1	Dibawah 25 tahun	1.7
2	26-30 tahun	5.6
3	31-35 tahun	17.4
4	36-40 tahun	21.1
5	41-45 tahun	17.7
6	46-50 tahun	11.3
7	Diatas 50 tahun	20.3
8	Tidak diketahui	4.9
TOTAL		100.0

Tabel 2 Jenis Kelamin Informan

NO	Jenis Kelamin	Persentase
1	Perempuan	22.0
2	Laki-laki	78.0
TOTAL		100.0

Tabel 3 Sektor/Frontline

NO	Sektor/Frontline	Persentase
1	Pendidikan	10.8
2	Kesehatan	4.4
3	Ekologi, Lingkungan dan Sumber Daya Alam	11.7
4	Perburuhan	5.1
5	Informal	5.6
6	Agraria and <i>Land reform</i>	3.2
7	Perempuan dan Anak	10.5
8	Hubungan antar -klan,- etnis, dan - agama	11.1
9	Media dan Media Sosial	4.4
10	Sektor keamanan	1.9
11	Antikorupsi	9.8
12	Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum	8.1
13	Reformasi Kepartaian dan Sistem Pemilu	9.8
14	Bisnis	3.7
TOTAL		100.0

Gambar 1 Peta Lokasi Pelaksanaan Survei



C. Temuan Survei

Alur pemaparan bagian temuan ini merupakan kombinasi dari alur kelompok pertanyaan dalam kuesioner. Kami memulainya dengan (1) institusi demokrasi, (2) aktor demokrasi, (3) relasi aktor dan institusi demokrasi; (4) tentang isu publik dan (5) kapasitas dan strategi aktor dalam menyambungkan antara gerakan mereka dengan isu yang menjadi kepentingan banyak pihak (isu publik). Dari sana, kami mengidentifikasi lima temuan besar yakni, demokrasi Indonesia telah stabil khususnya dalam kelompok insitusi demokrasi menyangkuat masyarakat sipil. Kedua, Ada kecenderungan penguatan politik berbasis ketokohan (*figure-based politis*). Ketiga, kecenderungan bahwa aktor utama menyeleksi aturan main demokrasi yang akan mendukung karir politik nya. Keempat, munculnya kerindangan pada gagasan negara kesejahteraan, yakni negara yang fungsi utamanya adalah memenuhi pelayanan dasar warganegara; dan kelima kecenderungan munculnya populisme yang sekaligus menantang gagasan model politik Indonesia klasik yang berbasis patronase (Crouch 1975 dan 1979) dengan model klasik “bureuacratic polity” (Jackson 1978). Ringkasan ini ditutup dengan refleksi dan identifikasi peta ke depan.

I. Mekuatnya Institusi Masyarakat Sipil dan Melemahnya

Institusi Tata Pemerintahan Demokratis: Kualitas Institusi Demokrasi

Realisasi gagasan demokrasi ala Beetham (kontrol populer dan persamaan politik warganegara) dapat dilihat dari praktek bekerjanya atau tidaknya institusi demokrasi. Institusi demokrasi yang dimaksud di sini adalah aturan main (rules and regulations), bukan merujuk pada ‘organisasi’ atau ‘lembaga’ demokrasi. Institusi demokrasi meliputi norma, nilai, sistem kepercayaan prosedur, konvensi, kesepakatan sosial, peraturan dan pengetahuan lokal yang dianggap membentuk struktur dan perilaku dan orientasi individu. (Lihat Lauth 2000: 23; Olsen & March, 1989:22)

Bersandar pada Beetham, survei ini mengidentifikasi kualitas demokrasi di Indonesia saat ini dengan cara melakukan penaksiran terhadap praktek tigabelas jenis institusi demokrasi. Ketigabelas jenis institusi demokrasi ini kami kelompokkan menjadi empat, yakni: *Pertama*, yang terkait dengan kewarganegaraan (citizenship) yakni terdiri dari kewarganegaraan yang setara (equal citizenship), aturan main (rule of law), keadilan yang setara (equal justice), dan hak asasi manusia universal (universal human rights).

Kedua, seperangkat aturan main yang terkait dengan keterwakilan (representation). Kelompok ini terdiri dari perwakilan politik yang demokratis (democratic political representation), partisipasi warganegara (citizen participation), adanya saluran kepentingan berbasis kepentingan dan isu yang terlembaga (institutionalized channels for interest- and issue-based representation), demokrasi lokal (local democracy), dan kontrol penggunaan instrumen kekerasan yang demokratis (democratic control of instruments of coercion).

Ketiga, seperangkat aturan main yang terkait dengan tata pemerintahan yang demokratis. Di sini, kelompok ini terdiri dari tata pemerintahan yang transparan, akuntable dan imparial, serta kemandirian pemerintah dalam membuat keputusan dan mengimplementasikannya.

Tabel 4 Penilaian Umum terhadap Aturan Main Formal

NO	Kelompok dan Jenis Institusi	Baik	Sedang	Buruk
		(% dari keseluruhan informan)		
	Demokrasi			
I	Kewarganegaraan	27%	39%	32%
II	Perwakilan	24%	41%	32%
III	Tata Kelola Pemerintahan	19%	38%	39%
IV	Masyarakat Sipil	44%	33%	21%
	Rerata	28%	38%	31%

Kalau institusi demokrasi yang paling kuat adalah yang terkait dengan masyarakat sipil, maka yang paling lemah adalah yang penting terkait dengan tata kelola pemerintahan. Lebih khususnya lagi pada institusi demokrasi “tata pemerintahan yang demokratis (transparansi, imparial dan akuntabel)” dan “kemandirian pemerintah dalam membuat dan menerapkan keputusan”.

Saat informan diminta melakukan evaluasi institusi demokrasi sejak 2008/2009 yakni sejak Pemilu terakhir di daerah masing-masing, Prosentase terbesar narasumber mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam aturan main demokrasi dalam 5 tahun terakhir. Narasumber yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia membaik lebih besar persentasenya dibandingkan mereka yang menilai demokrasi Indonesia memburuk.

Tabel 5 Penilaian Kemajuan Aturan Main Formal Demokratis dalam 5 Tahun Terakhir

NO	Kelompok dan Jenis Institusi	Membaik	Memburuk	Tidak Berubah
		(% dari keseluruhan informan)		
	Demokrasi			
I	Kewarganegaraan	30%	24%	43%
II	Perwakilan/Representasi	29%	24%	43%
III	Tata Kelola Pemerintahan	26%	26%	45%
IV	Masyarakat Sipil	45%	18%	34%
	Rata-rata	33%	23%	41%

Kecenderungan narasumber menyatakan aturan main formal demokrasi tidak berubah kemungkinan diakibatkan oleh, dalam kenyataannya, penekanan pada pembuatan aturan main demokrasi tidak berbanding lurus dengan penguatan aspek substansi dari aturan main tsb. Banyak aturan main dengan orientasi yang ideal yang telah dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah, namun sangat lemah dari sisi substansi dan implementasi. Pada aspek substansi misalnya, seringkali isi aturan main yang ada tidak sejalan dengan tujuan aturan main tersebut. Akibatnya berujung pada upaya *judicial review* atau *constitutional review*. Sinkronisasi antar aturan main dengan isi yang senada juga sangat lemah. Akibatnya terjadi kontradiksi antara produk perundangan dalam sektor yang sama. Pada saat bersamaan, negara tidak berfungsi dengan baik sehingga penerapan aturan main hanya menjadi “pepesan kosong”. Hal ini misalnya bisa dilihat dari studi yang menyebutkan bahwa minimnya akuntabilitas, proses legislasi yang dengan karakter dagang sapi, dsb yang merupakan tantangan berat dalam demokrasi di Indonesia merupakan bagian dari menguatnya ilegalitas karena negara tidak berfungsi dengan baik (Aspinall & Klinken [eds.], 2011).

Alhasil, bisa disimpulkan dengan aman bahwa politik Indonesia saat ini cenderung mengarah ke liberalisasi politik yang menguat namun tidak selalu identik dengan penguatan demokrasi (*more liberalism, less democracy*).

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia, dilihat dari praktek institusi demokrasi, ada yang menguat ada yang melemah. Atau ada spektrum dalam kualitas demokrasi di Indonesia. Temuan ini berbeda dengan dua kelompok besar pendapat tentang demokrasi di negeri ini sebenarnya sudah aman dan mengalami kemajuan yang berarti (Diamond 2009, 2012); dan kelompok ahli yang berpendapat bahwa demokrasi Indonesia memburuk karena menguatnya patronase (Klinken 2009), dan mengalami “stagnasi” karena kuatnya elit yang anti-demokrasi (Mietzner 2012). Dengan kata lain, temuan survei ini sulit untuk menggeneralisasi kualitas demokrasi di Indonesia bila dilihat dari 13 aturan main di atas. Kita perlu secara spesifik merujuk pada satu aspek dalam melakukan penaksiran demokrasi di Indonesia.

2. Menguatnya “Politik Berbasis Individual”: Aktor Demokrasi

“Aktor” merupakan gagasan sentral dalam konsep demokrasi. Secara konvensional aktor politik merujuk pada individu atau kelompok individu yang Aktor dalam demokrasi sering disamakan dengan “elit”, atau “pemimpin”. Ada kalanya elit atau pemimpin memiliki akar massa yang kuat, tapi ada juga yang tidak, dan mereka bersifat mengambang, atau *floating*. “Aktor” dalam gagasan demokrasi ala Beetham, merupakan agensi yang membentuk keterwakilan popular, dan mengakar pada kekuatan popular ini. Jadi, dalam gagasan Beetham, “aktor” lebih dari sekedar “elit”, atau “pemimpin”. Sebagaimana telah disebutkan di atas, demokrasi adalah proses kontrol popular terhadap isu publik berbasis persamaan politik. “Aktor” dalam gagasan Beetham ini merujuk pada (Budiman dan Tornquist, 2001). Aktor demokrasi adalah subyek yang melakukan kontrol terhadap isu publik.

Pertanyaan survei ini terkait dengan aktor adalah tentang eksistensi dan peran mereka dalam mendorong kontrol publik terhadap proses politik. Sebelum ke sana, kami meminta pada informan untuk mengidentifikasi empat aktor berpengaruh di wilayah mereka masing-masing, dan di empat arena: Negara dan pemerintah, masyarakat politik, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Jadi, setiap informan menyebutkan 16 aktor berpengaruh. Tidak semua informan kami menyebutkan ke-16 nama. Total nama masuk ke dalam data kami adalah 5.801 orang. Setelah itu, kami meminta informan untuk memeras 16 nama tsb menjadi empat nama: dua nama untuk aktor ‘dominan’ dan dua nama untuk aktor ‘alternatif’. Jumlah total aktor berpengaruh adalah 2.222 orang.

Yang kami maksud sebagai aktor “dominan” dan “alternatif” adalah aktor yang menguasai pengambilan keputusan (di tingkat Negara) dan juga terkadang menguasai wacana publik; alternatif aktor adalah yang menguasai wacana publik tapi memiliki keterbatasan dalam terlibat dalam pengambilan keputusan. Biasanya aktor alternatif berada di wilayah masyarakat sipil.

Siapakah ke-2000an aktor ini dan apa latar belakang sosial dan politik mereka? Kami mencoba mengelompokkan mereka menjadi dua kategori yakni apakah mereka terkait dengan Orde Baru atau tidak. Ada empat kategori ‘terkait dengan Orde Baru’ yakni a) para administrator atau birokrasi selama era Orde Baru; b) pengurus Golkar, c) anggota dan aktif di lembaga korporatis Negara seperti Korpri, PKK, Karang taruna, Dharma Wanita, PWI, PGRI, dll. dan d) Para pengusaha kroni Orde Baru. Kebutuhan untuk melakukan pengelompokan ini adalah untuk melihat latar belakang sosial dan politik pada aktor di tingkat lokal ini, sekaligus mengetes argumen yang dibuat para ahli tentang demokrasi

Indonesia yang mengatakan bahwa saat ini Indonesia didominasi oleh elit yang terkait dengan kekuatan Orde Baru (Hadiz & Robison 2004). Temuan survei kami menunjukkan bahwa hanya 25,6% yang memiliki kaitan dengan Orde Baru dan sisanya yakni 74.4% tidak terkait. Kami menyebutnya sebagai “elit baru” yang koneksi nya dengan Orde Baru bersifat terbatas.

Lebih jauh lagi, kami bertanya tentang di posisi apa para aktor ini berada. Ada 13 posisi yang kami identifikasi sebagaimana dapat dilihat di tabel berikut.

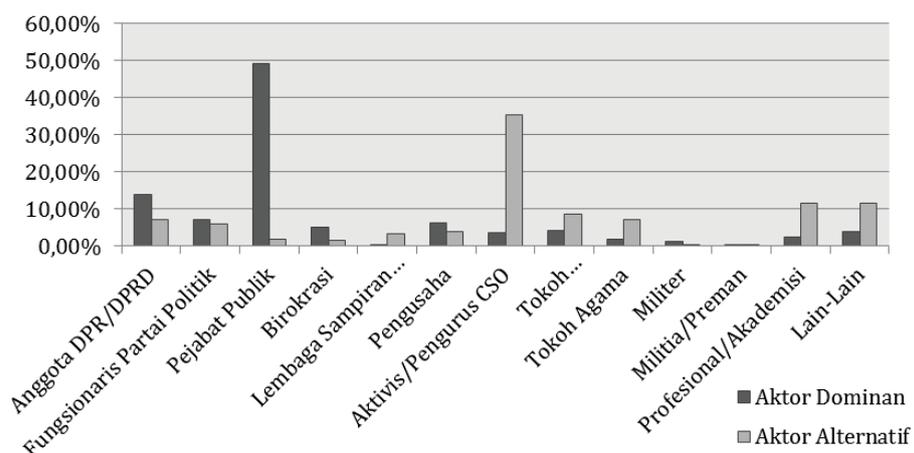
Tabel 6 Posisi Aktor Utama

No	Posisi Aktor Saat Ini	%
1.	Anggota DPR/DPRD	12.5
2.	Fungsionaris Parpol	11.2
3.	Pejabat Publik yang terpilih melalui pemilu	15.1
4.	Birokrasi	5.9
5.	Anggota Komisioner	1.1
6.	Pengusaha	15.4
7.	Aktivis/Pengurus/Pimpinan CSO	17.3
8.	Tokoh Adat/Klan/Etnis/Ormas/Masyarakat	11.1
9.	Tokoh Agama	3.5
10.	Militer	1.3
11.	Militia	0.1
12.	Profesional/Akademisi	5.6

Data di atas menunjukkan bahwa lima posisi tertinggi yang diduduki oleh aktor berpengaruh adalah aktivis masyarakat sipil, kelompok pengusaha, pejabat publik, anggota parlemen dan pimpinan/aktivis partai politik, dan pimpinan adat/pimpinan kelompok etnis (huruf *italics* dalam tabel).

Apabila jenis aktor utama (dominan dan alternatif) disilangkan dengan posisi aktor utama saat ini, grafik berikut memperlihatkan hal tsb.

Grafik 2 Posisi Aktor Dominan dan Alternatif Saat Ini



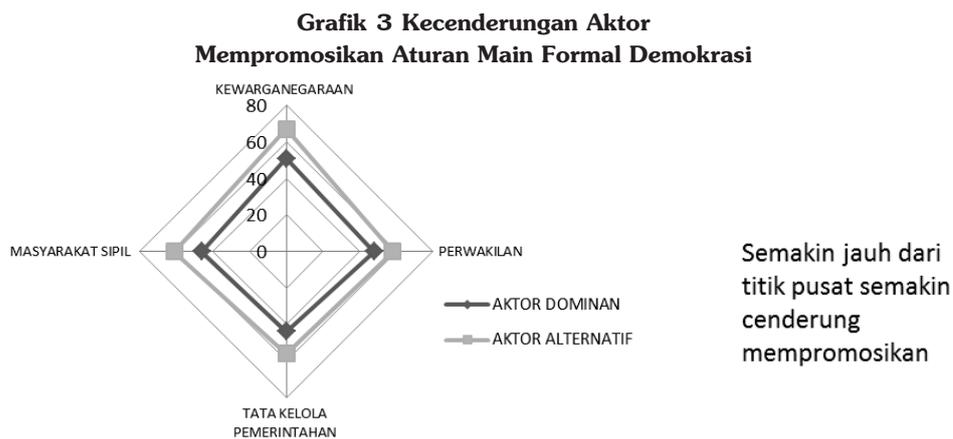
Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa tiga posisi tertinggi untuk aktor dominan adalah posisi kepala daerah yang dipilih melalui pemilu, anggota DPRD Kota, dan kelompok pengusaha. Sementara untuk aktor alternatif, tiga besar adalah aktivis masyarakat sipil, kelompok profesional/akademisi, dan ketua adat/ketua kelompok etnis. Para aktor dominan kebanyakan berada di wilayah Negara dan aktor alternatif adalah di wilayah masyarakat sipil.

Dari temuan tentang aktor dominan, khususnya dari tingginya posisi aktor utama dalam di posisi publik hasil pemilu, ada kecenderungan bahwa politik saat ini berbasis pada individual atau “figure-based politics”, maksudnya jenis politik yang terfokus pada figur yang menduduki posisi publik seperti pimpinan daerah (propinsi dan kabupaten/kota). Kecenderungan ini diperkuat dengan temuan di bagian 5 ringkasan eksekutif ini. Di bagian ini kami bertanya bagaimana aktor dominan mendapatkan otoritas dan menjadi *legitimate*, kebanyakan jawaban adalah dengan menggunakan uang dan otoritas individual. Artinya, individual politisi cenderung tidak membutuhkan organisasi dalam memobilisasi dukungan. Saat kami bertanya pada informan bagaimana proses mobilisasi dukungan dilakukan, data menunjukkan bahwa para aktor utama menggunakan cara organisasi. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa penggunaan organisasi ini sebatas memobilisasi pemilih di saat pemilu. Politik elektoral adalah politik berbasis angka yang dicapai. Setelah angka kemengangan terpenuhi capai, mobilisasi berakhir. Penggunaan organisasi bukan karena ada kaitan antara aktor utama dengan basis pendukungnya, melainkan bersifat pragmatis.

3. “Beda Aktor, Beda institusi”: Hubungan Aktor & Institusi Demokrasi

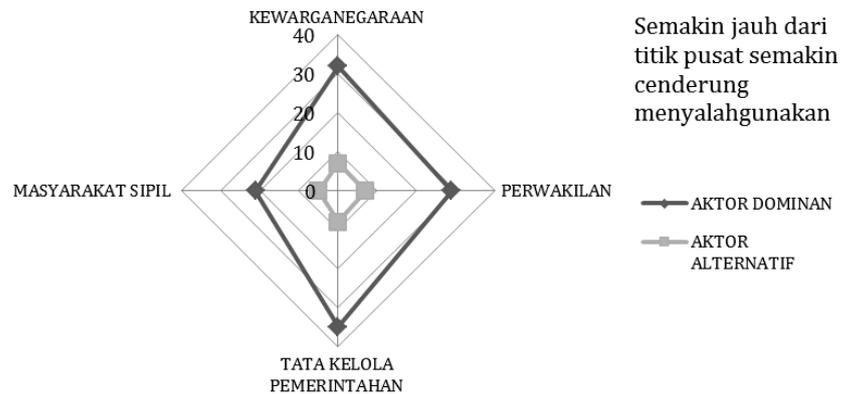
Kita telah mendiskusikan bagian institusi demokrasi (democratic rules and regulations) dan tentang aktor utama (dominan dan alternatif). Institusi demokrasi adalah benda mati, ia hanya bisa aktif ketika ada aktor yang menggunakannya atau menyalahgunakannya. Aspek aktor sangat penting dalam menilai institusi demokrasi. Oleh karena itu, kurang mencukupi bila penaksiran dilakukan sebatas pada 13 aturan main. Yang juga penting adalah mengaitkannya dengan aktor. Ini berguna untuk melihat nuansa dalam menakar apakah aktor-aktor utama yang ada mempromosikan atau menyalahgunakan aturan main formal demokrasi..

Hasil survei PWD ini menunjukkan bahwa para aktor utama, baik aktor dominan maupun aktor alternatif, cenderung mempromosikan demokrasi daripada menyalahgunakannya. Tampaknya aktor utama di Indonesia seiring dengan gagasan Larry Diamond bahwa demokrasi telah menjadi “the only game in town” (1999: 65). Karena itulah, demokrasi Indonesia akan terus membaik secara berkesinambungan.



Namun survei PWD ini juga memberikan dua catatan penting terkait dengan hubungan antara aktor utama dan aturan main formal demokrasi. Pertama, Aktor dominan berpeluang lebih besar untuk menyalahgunakan demokrasi dibandingkan aktor alternatif. Kedua, sejauh ini bentuk promosi yang paling konkrit dari aktor utama tersebut adalah sosialisasi. Para aktor utama tersebut hadir dalam berbagai sosialisasi aturan main yang ada di berbagai forum publik. Tidak semuanya berusaha serius terlibat lebih jauh untuk memastikan bagaimana aturan main tersebut agar selalu berorientasi kepentingan publik dan bisa diterapkan dengan baik.

Grafik 4 Kecenderungan Aktor Utama Menyalahgunakan Aturan Main Formal Demokrasi



Survei PWD ini juga menunjukkan bahwa aktor dominan dan aktor alternatif memiliki kecenderungan yang berbeda dalam mempromosikan jenis aturan main formal demokrasi. Aktor dominan lebih cenderung mempromosikan aturan main formal demokrasi yang terkait dengan kewarganegaraan dan representasi politik. Sedangkan aktor alternatif lebih cenderung mempromosikan aturan main formal demokrasi yang terkait dengan tata kelola pemerintahan dan masyarakat sipil.

Apabila kita lihat komposisi aktor utama di bagian sebelumnya dimana sebagian besar aktor dominan berasal dari politisi dan pejabat publik sedangkan aktor alternatif berasal dari aktivis organisasi masyarakat sipil (lihat bagian selanjutnya dalam naskah ringkasan eksekutif ini), perbedaan antara aktor dominan dan aktor alternatif dalam mempromosikan kelompok aturan main demokrasi dibedakan oleh beberapa hal berikut ini: *Pertama*, masing-masing aktor utama tidak pernah melintasi wilayah atau domainnya sendiri-sendiri. Masyarakat sipil ada di masyarakat sipil, masyarakat politik ada di domainnya sendiri, dst. Oleh karena itu setiap jenis polity terisolasi ke dalam dirinya, aktivitasnya sendiri dan mempromosikan aturan main yang terkait dengan ranah sendiri yakni tentang masyarakat sipil dan tata pemerintahan yang demokratis. Di sisi lain, para politisi di masyarakat politik juga hanya memiliki perhatian pada isu yang terkait dengan perwakilan yang terkait dengan dirinya sendiri juga.

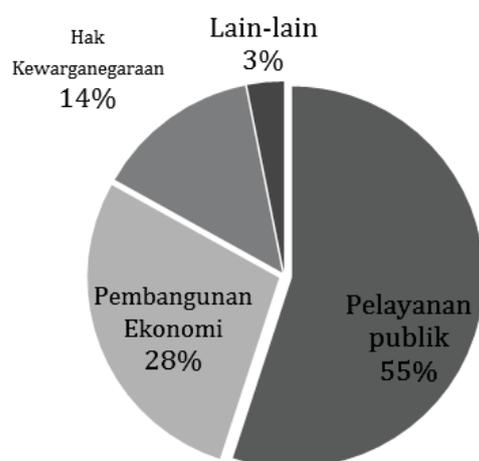
Kedua, bagi aktor dominan jauh lebih menarik mempromosikan aturan main yang terkait dengan isu-isu kewarganegaraan formal, seperti kebebasan berbicara, dsb dan isu soal perwakilan karena hal tersebut menarik perhatian orang banyak sehingga menguntungkan bagi mereka dalam mempromosikan dirinya sendiri, apa yang kami beri label sebagai “politik (berbasis) figur” (lihat bagian selanjutnya dari ringkasan eksekutif ini). Isu berbasis kewarganegaraan dan perwakilan ini akan memperkuat citra para politisi untuk mendongkrak popularitas mereka.

4. Merindukan Negara kesejahteraan: isu publik dan pembentukan “demos”

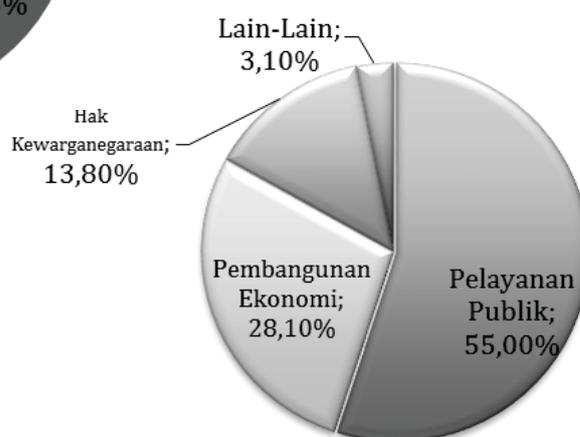
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, isu publik adalah aspek penting dalam gagasan demokrasi David Beetham. Isu publik inilah yang mengikat gerakan popular akar rumput untuk bergerak bersama-sama. Dalam survei ini kami bertanya tentang isu publik ini, khususnya yang terkait dengan *jenis* isu dan *siapa* yang seharusnya mengelola isu publik.

Terkait dengan *jenis* isu yang dianggap isu publik, temuan survei memperlihatkan bahwa isu yang terkait dengan pelayanan publik yakni kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi

Grafik 5 Problem yang Dianggap sebagai Isu Publik



Grafik 6 Isu Publik Terpenting



Aspek kedua yang kami tanyakan pada informan adalah siapa yang seharusnya mengurus isu publik ini, apakah Negara, pasar (sektor privat), organisasi kemasyarakatan atau organisasi lain berbasis masyarakat? Sebagian besar informan menjawab Negara lah yang seharusnya mengurus isu publik yang utama ini. Sebanyak 55% menjawab untuk pelayanan publik dasar Negara harus mengurus, untuk pembangunan ekonomi sebanyak 29.5% menjawab Negara, sebanyak 19.8% menjawab bahwa hak-hak warganegara harus diurus oleh Negara.

Dari sini kita bisa mengargumentasikan bahwa ada kerinduan dan kebutuhan terhadap gagasan Negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara Kesejahteraan di sini merujuk pada adanya jaminan akan penyediaan pelayanan publik dasar seperti kesehatan. Pendidikan, perumahan umum, pensiun, fasilitas transportasi publik. perumahan dan keamanan fisik. Jaminan tersebut berada pada regulasi dan implementasi yang konkrit bukan hanya janji para calon kepala daerah dan kebijakan yang bersumber dari elit. Masalah pada jaminan dari elit ini adalah soal kerentanannya. Saat elit tidak lagi menjabat, maka besar kemungkinan para penggantinya akan memiliki orientasi yang berbeda, dan karenanya mengganti kebijakan.

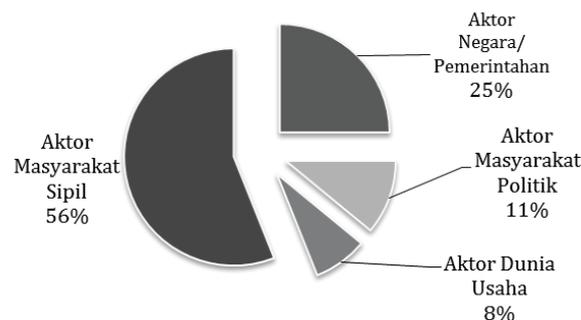
Kerinduan terhadap adanya Negara yang mengurus pelayanan dasar warganegara pada kenyataan belum terjadi. Pasar atau sektor swasta dan tata kelola berbasis masyarakat lebih berperan dalam penyediaan layanan ini (lihat tabel 9). Artinya warganegara merindukan Negara, tapi Negara malah memberi sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Bukan berarti Negara sama sekali tidak berfungsi, namun Negara tampaknya lebih disibukan membuat aturan tentang layanan publik, tapi bukan mengimplementasikannya. Aparatur Negara pada umumnya masih lemah dalam implementasi kebijakan. Dengan kata lain, yang dilakukan oleh Negara sebatas formalistik ketimbang penyediaannya layanan itu sendiri.

Tabel 9 Lembaga untuk Menyelesaikan Persoalan Publik

No	Lembaga Urusan Publik	Jumlah Jawaban	Persentase Jawaban	Persentase Informan
1	Tata kelola privat	106	9.8%	17.9%
2	Tata kelola berbasis komunitas dan masyarakat sipil yang independen	397	36.8%	67.1%
3	Tata kelola hasil kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan	214	19.8%	36.1%
4	Birokrasi sipil dan militer	79	7.3%	13.3%
5	Peradilan dan kepolisian	170	15.8%	28.7%
6	Eksekutif pemerintah	113	10.5%	19.1%
TOTAL		1079	100.0%	N=592

Berikutnya adalah kelompok orang yang paling sering membicarakan isu publik ini. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sipil merupakan aktor yang paling aktif membicarakan isu publik. Secara tentatif, kami bisa mengargumentasikan bahwa elemen masyarakat sipil merupakan entitas 'demos' atau elemen rakyat yang aktif dalam isu publik ini. Temuan ini menunjukkan bahwa 'demos' telah hadir di Indonesia dan 'demos' ini bersifat solid, tidak terfragmentasi, meskipun sebatas pada pembicaraan tentang isu publik.

Grafik 7 Aktor yang Terlibat dalam Pembahasan Isu Publik



Masyarakat sipil yang aktif adalah salah satu pilar demokrasi yang kuat. Untuk dapat berfungsi secara efektif, institusi demokrasi membutuhkan arena yang mandiri dan plural yang dapat digunakan untuk berkumpul dan berinteraksi. Di dalamnya, warga negara dapat mengurus urusannya sendiri dan mempengaruhi pelayanan publik. Kehidupan asosiasi yang kuat ini pada gilirannya merupakan kondisi penting untuk mengamankan kebijakan pemerintah dan menjamin berjalannya pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan warganegara (Beetham, Carvalho, Landman & Weir, 2002:28). Lebih jauh lagi, masyarakat sipil menyumbang pada demokrasi dengan cara memberi garis batas antara entitas negara dan masyarakat, dan mengontrol serta membatasi peluang kekuasaan yang berlebihan yang ada di tangan negara, dan membangun institusi politik demokratis sebagai alat kontrol negara yang efektif.

Pembicaraan atau perdebatan tentang isu publik saja tidak mencukupi untuk memecahkan masalah publik. Yang tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa isu publik akan 'ditangkap' oleh masyarakat politik seperti partai politik dan lembaga perwakilan, dan kemudian diproses menjadi kebijakan publik. Ada celah antara isu publik dan kebijakan publik. Kebijakan publik terkait dengan aktor-aktor yang memiliki akses terhadap

pengambilan keputusan yakni masyarakat politik dan Negara atau pemerintah. Di titik ini ada kebutuhan menyambungkan entitas masyarakat sipil yang membicarakan secara aktif isu publik, dan masyarakat politik yang memiliki akses terhadap pengambilan kebijakan. Se jauh celah antara masyarakat sipil dan masyarakat politik plus Negara masih berlangsung, sejauh itu pulalah isu publik hanya akan menjadi isu, tidak menjadi kebijakan. Artinya, demokrasi belum akan menjadi bermakna, dan demokrasi mengalami stagnasi, menggunakan istilah yang dipakai oleh Mietzner (2012). Artinya, demokrasi baru sebatas mendorong kebebasan politik, bukan mendorong pada kesejahteraan.

Tentu saja ada pengecualian dari temuan survei PWD ini. Dari studi lanjutan survei ini (yang saat ini masih berlangsung), diperoleh data awal tentang upaya-upaya menyambungkan elemen masyarakat sipil dan masyarakat politik dalam beberapa kasus terkini, misalnya kasus lahirnya BPJS. Kasus ini memperlihatkan bahwa konsolidasi masyarakat sipil dan partai politik telah berlangsung. Namun demikian, tren umum yang ada di Indonesia adalah apa yang kamu temukan dalam survei ini.

Perlu juga dicatat bahwa keterlibatan CSO dalam urusan-urusan di lembaga pemerintah telah meningkat selama satu dekade terakhir, khususnya dalam agen-agen khusus yang isinya adalah kombinasi aparat negara dan elemen masyarakat sipil. Organisasi sejenis ini telah makin penting perannya dalam politik Indonesia dan telah juga menjadi saluran dan alat perwakilan penting untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang biasa dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Masih terkait dengan organisasi masyarakat sipil, selama lima tahun terakhir ini, tidak terlalu nampak pergeseran dari metode yang digunakan organisasi masyarakat sipil dalam memobilisasi dan mengorganisasi dukungan, dan menempatkan isu publik menjadi agenda politik. Sebagai aktor alternatif, aktivis masyarakat sipil masih bergantung pada media dan jaringan sesama mereka, ketimbang kegiatan-kegiatan turun lapangan seperti pengorganisasian dan advokasi, dalam rangka mengurangi proses eksklusi politik.

Tabel 10 Cara Aktor Mengatasi Eksklusi

No	Cara Aktor Mengatasi Eksklusi	Aktor Dominan (%)	Aktor Alternatif (%)
1	Menggunakan patronase	7%	2%
2	Menggunakan instrumen uang	3%	1%
3	Menggunakan wacana/informasi/media	9%	18%
4	Menggunakan organisasi dan institusi demokrasi	6%	5%
5	Menggunakan Kekerasan/intimidasi	2%	0%
6	Menggunakan propaganda/kampanye	7%	4%
7	Menggunakan persuasi	30%	15%
8	Menggunakan otoritas/kewenangan	8%	1%
9	membuka akses pada publik/melibatkan masy	8%	5%
10	Membangun Image/pencitraan	2%	0%
11	Menggunakan Aksi Massa/konsolidasi massa/jaringan/organisasi massa	3%	16%
12	Membuat program konkrit/advokasi	2%	4%
13	Lain-Lain	3%	2%
14	Tidak melakukan apa-apa	8%	2%
TOTAL		100%	100%

Tabel 1 1 Metode dan Memobilisasi Massa

NO	Metode Memobilisasi Massa	Aktor	
		Dominan (%)	Alternatif (%)
1	Menggunakan koneksi di dalam klan, agama, atau organisasi	3.9%	3.9%
2	Menggunakan Media Sosial	4.0%	6.9%
3	Menggunakan saluran organisasi	12.4%	5.0%
4	Membonceng isu yang sedang aktual	3.7%	5.0%
5	Menggunakan jejaring yang memiliki persamaan ideologi	1.0%	0.5%
6	Melalui koalisi politik	0.4%	0.1%
7	Menggunakan instrumen uang dan sumber daya lainnya	5.1%	1.6%
8	Mencari dukungan elit	2.7%	1.4%
9	Menggunakan tokoh kharismatik	4.8%	2.9%
10	Menggunakan populisme dan egalitarianisme	9.7%	3.1%
11	Menggunakan jaringan yang dimiliki	14.7%	22.7%
12	Menggunakan cara kekerasan/koersif	1.3%	0.6%
13	Menggunakan model patronase	1.3%	0.2%
14	Menggunakan model pendidikan politik dan advokasi	0.3%	9.9%
15	Jawaban tidak jelas	10.8%	13.3%
16	Kombinasi kategori diatas	16.4%	15.3%
17	Tidak tahu	7.3%	7.8%
TOTAL		100.0%	100.0%

Kesimpulannya, ketergantungan CSO pada media massa (baik konvensional maupun media sosial) membuat upaya mereka untuk mempengaruhi agenda politik kurang bermanfaat. Tren menunjukkan bahwa elemen masyarakat sipil sebatas sibuk dalam membicarakan isu publik, dan menjadi bagian dari organisasi gabung negara dan masyarakat sipil, tapi belum mampu menekan para pengambil kebijakan dan para politisi untuk mentransformasi isu mereka menjadi agenda publik.

5. Pasca Klientelisme, Kemunculan Populisme

Sejauh ini politik klientelisme dianggap masih menjangkiti demokrasi di Indonesia. Sekalipun selalu dilihat sebagai praktik tradisional yang akan hilang dengan sendirinya akibat modernisasi, beberapa pengamat (lihat, misalnya, Klinken 2009) justru berpendapat proses demokratisasi di negara-negara seperti Indonesia baru mampu membuat praktik klientelisme tetap bertahan sebagai alternatif terhadap model akuntabilitas yang demokratis. Dalam hal ini politik klientelisme bisa dipahami sebagai praktik memberikan keuntungan pribadi dalam bentuk uang, pekerjaan atau akses ke layanan publik untuk mendapatkan dukungan suara. Sebaliknya akuntabilitas demokrasi adalah praktik menawarkan keuntungan yang berbasis program politik dan kebijakan untuk meningkatkan jumlah pendukung.

Secara garis besar sebagian hasil survei ini membenarkan karakter klientelistik demokrasi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan praktik-praktik yang berkaitan dengan hubungan patron-klien seperti aksi persuasif dan penggunaan patronase masih menjadi metode paling penting yang diterapkan oleh aktor-aktor dominan dalam mengatasi persoalan eksklusif (lihat Tabel 14). Survei lebih jauh menegaskan bahwa basis utama para aktor yang sama untuk menjadi pemimpin politik yang *legitimate* dan otoritatif adalah sumberdaya ekonomi dan hubungan sosial yang baik (lihat Tabel 15). Sekalipun kedua

jenis sumberdaya ini tidak serta merta mengimplikasikan adanya politik klientelisme, kombinasi antara basis ekonomi dalam arti kepemilikan kapital dan koneksi (politik) secara luas dipahami sebagai elemen–elemen utama hubungan patron–klien. Karena itu temuan ini bisa dianggap mendukung argumen yang keberlanjutan politik klientelisme dalam demokrasi di Indonesia.

Tabel 12 Cara Aktor Mengatasi Eksklusi

No	Cara Aktor Mengatasi Eksklusi	Aktor	Aktor
		Dominan (%)	Alternatif (%)
1	Menggunakan patronase	7%	2%
2	Menggunakan instrumen uang	3%	1%
3	Menggunakan wacana/informasi/media	9%	18%
4	Menggunakan organisasi dan institusi demokrasi	6%	5%
5	Menggunakan Kekerasan/intimidasi	2%	0%
6	Menggunakan propaganda/kampanye	7%	4%
7	Menggunakan persuasi	30%	15%
8	Menggunakan otoritas/kewenangan	8%	1%
9	membuka akses pada publik/melibatkan masy	8%	5%
10	Membangun Image/pencitraan	2%	0%
11	Menggunakan Aksi Massa/konsolidasi massa/jaringan/organisasi massa	3%	16%
12	Membuat program konkrit/advokasi	2%	4%
13	Lain–Lain	3%	2%
14	Tidak melakukan apa–apa	8%	2%
TOTAL		100%	100%

Walau begitu, hubungan patron–klien tidak lagi menjadi satu–satunya alternatif terhadap model pertanggungjawaban yang berbasiskan tawaran program–program politik. Menurut hasil survei ini Indonesia juga sedang menyaksikan berkembangnya kecenderungan kearah populisme. Sekalipun memberikan patronase kepada klien masih terus dipraktikkan, para aktor dominan menjadi semakin tergantung pada upaya mengembangkan populisme dan kepemimpinan kharismatik dalam memobilisasi dan mengelola dukungan (lihat Tabel 15 dan 16). Bahkan populisme juga menjadi tumpuan para aktor yang diharapkan bisa mengambil peran sebagai pemimpin alternatif. Sebaliknya, metode–metode yang bisa diasosiasikan dengan model akuntabilitas yang demokratis dalam memobilisasi dan mengelola dukungan seperti membangun dan mengembangkan organisasi dengan cara *bottom–up* dan mengkoordinasikan kelompok–kelompok kepentingan dan gerakan sosial hanya mencatat prosentase yang kecil.

**Tabel 13 Kapasitas Aktor Dominan
dalam Memobilisasi dan Mengorganisasi Dukungan**

No	Metode Mobilisasi	RANK 1 (%)	RANK 2 (%)	RANK 3 (%)	Total Jawaban (%)
1	Menggunakan Populisme	47%	6%	5%	20%
2	Menggunakan kepemimpinan kharismatik	12%	20%	4%	12%
3	Membangun Patronase	12%	11%	8%	11%
4	Memberikan Perlindungan dan Dukungan	5%	8%	6%	6%
5	Menyediakan kontak dengan tokoh-tokoh berpengaruh	4%	17%	10%	10%
6	Memanfaatkan koneksi keluarga dan klan	6%	12%	15%	11%
7	Membangun jaringan antaraktor yang memiliki kepentingan yang sama	6%	12%	22%	13%
8	Melakukan koordinasi/organisasi kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan terkait	4%	10%	15%	9%
9	Menyatukan jaringan individu dan kolektif	3%	5%	15%	8%
TOTAL		100%	100%	100%	100%

**Tabel 14 Kapasitas Aktor Alternatif
dalam Memobilisasi dan Mengorganisasi Dukungan**

No	Metode Mobilisasi	RANK 1 (%)	RANK 2 (%)	RANK 3 (%)	Total Jawaban (%)
1	Membangun Populisme	31%	5%	4%	14%
2	Menggunakan kepemimpinan kharismatik	10%	8%	2%	7%
3	Membangun Patronase	4%	3%	4%	3%
4	Memberikan Perlindungan dan Dukungan	20%	13%	9%	14%
5	Menyediakan kontak dengan tokoh-tokoh berpengaruh	6%	11%	6%	8%
6	Memanfaatkan koneksi keluarga dan klan	2%	5%	3%	4%
7	Membangun jaringan antaraktor yang memiliki kepentingan yang sama	10%	21%	14%	15%
8	Melakukan koordinasi/organisasi kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan terkait	9%	23%	26%	19%
9	Menyatukan jaringan individu dan kolektif	8%	11%	32%	16%
TOTAL		100%	100%	100%	100%

Populisme dalam studi ini dipahami sebagai gaya politik Manichean yang mencakup tiga dimensi pokok (Raadt, Hollander, Krouwel 2004). *Pertama*, populisme mengacu pada “rakyat”. Para pemimpin populis umumnya mengaku mewakili dan bertindak atas nama “rakyat” dalam pengertian orang kebanyakan. *Kedua*, populisme juga berkaitan dengan gagasan menciptakan dan memperkuat hubungan antara para pemimpin populis dan rakyat yang bersifat langsung. Berbagai bentuk mediasi melalui organisasi atau gerakan dipandang kan mendistorsi hubungan pemimpin dan rakyat. *Ketiga*, gaya politik ini secara pekat mengandung sentiment-sentimen anti kemapanan dan anti elit. Para pemimpin populis diantaranya selalu mengklaim dirinya sebagai aktor yang mau “berbicara” dengan masyarakat dibanding para elit lain yang sibuk “memperkaya diri”. Boleh dibilang *blusukan*, istilah yang

digunakan untuk menggambarkan gaya politik yang sedang naik daun yang dipraktikkan oleh tokoh seperti Gubernur Jakarta saat ini, Joko Widodo, adalah contoh mutakhir populisme dalam demokrasi di Indonesia.

Di lihat dari sudut pandang inklusi politik, baik populisme maupun klientelisme cenderung mengkooptasi, dan bukan melibatkan, rakyat ke dalam proses politik melalui saluran-saluran yang bersifat vertikal dan beragam (Mouzelis 1998). Tapi populisme jelas berbeda dengan klientelisme. Sementara klientelisme memperdagangkan keuntungan material untuk dukungan politik, seorang pemimpin populis menawarkan program-program politik (yang bersifat populis) untuk menarik perhatian para pemilih. Bahkan, menjajakan program-program politik yang sesuai dengan keinginan rakyat merupakan perhatian utama elit politik Indonesia (lihat bagian aktor). Lebih dari itu, seperti yang ditunjukkan survei ini, para aktor utama yang kian bergantung pada populisme mulai menaruh perhatian yang cukup besar terhadap upaya memperoleh dukungan yang lebih luas (lihat Tabel 15 dan 16).

Tabel 15 Indikator Kesuksesan dalam Memobilisasi dan Mengorganisasi Dukungan

NO	Indikator Kesuksesan	Aktor Dominan (%)	Aktor Alternatif (%)
1	Munculnya lebih banyak lagi aksi demonstrasi dan mobilisasi massa	0%	2%
2	Terwujudnya koneksi dengan partai politik	3%	2%
3	Terwujudnya koneksi/jejaring individual	3%	8%
4	Terlibat dalam proses pembuatan kebijakan secara kolektif	3%	2%
5	Isunya menjadi perhatian publik dan media	15%	26%
6	Aktor menduduki jabatan publik/politik	28%	14%
7	Aktor bisa membentuk organisasi massa	3%	2%
8	Aktor mendapatkan massa pendukung	31%	34%
9	Lain-lain	13%	11%
TOTAL JAWABAN		100%	100%

Tabel 16 Penyebab Kegagalan Aktor dalam Memobilisasi dan Mengorganisasi Dukungan

No	Penyebab Kegagalan Aktor dalam Memobilisasi dan Mengorganisasi Dukungan	Aktor Dominan (%)	Aktor Alternatif (%)
1	Fragmentasi	6%	5%
2	Persoalan ideologi	3%	3%
3	Jaringan yang tidak terkelola dengan baik	16%	23%
4	Mobilisasi hanya dilakukan via sosial media (facebook, twitter, dsb)	0%	0%
5	Isunya tidak jelas/substantif	3%	2%
6	Ketidakmampuan mengidentifikasi persoalan dasar dan/atau memetakan aktor	14%	13%
7	Aktor lain lebih kuat dan terorganisasi	19%	12%
8	Keterbatasan dukungan publik dan/atau mendapat resistensi dari masyarakat	20%	14%
9	Kurangnya 'political awareness'	5%	4%
10	Keterbatasan kapasitas institusi/aktor	10%	21%
11	Lain-lain	4%	4%
TOTAL		100%	100%

Serupa dengan itu, ketika ditanya tentang cara mengubah isu menjadi masalah publik, tampak jelas dukungan masyarakat, partai politik, tokoh-tokoh kunci dan koalisi kepentingan merupakan faktor-faktor utama. (lihat Tabel 17 dan 18).

Tabel 17 Indikator Kesuksesan Mengubah Isu Prioritas menjadi Isu Publik

NO	Indikator Kesuksesan Mengubah Isu Prioritas menjadi Isu Publik	Aktor Dominan (%)	Aktor Alternatif (%)
1	Isu muncul di media	4%	5%
2	Isu menjadi wacana publik	8%	12%
3	Isu menjadi agenda pembahasan pemerintah, parlemen, partai politik, dan CSO	2%	3%
4	Isu membawa perbaikan di bidang infrastruktur fisik	1%	1%
5	Aktor berhasil menduduki jabatan publik atau anggota parlemen	14%	14%
6	Isu mendorong lahirnya kebijakan bercorak 'welfare' dan/atau mendorong implementasi kebijakan bercorak 'welfare' (pendidikan, kesehatan, jaminan keamanan, jaminan mendapat pekerjaan dan upah yang layak dsb)	7%	5%
7	Isu mendapat dukungan dari masyarakat, partai politik, CSO dan sebagainya, (terbentuknya satu koalisi sebagai bentuk pengelolaan konflik)	17%	16%
8	Isu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	4%	3%
9	Isu membawa keuntungan (bagi aktornya) baik secara material, maupun sosial dan politik	4%	1%
10	Isu mendorong lahirnya aktivitas sosial yang melibatkan masyarakat luas	2%	1%
11	Isu mendorong pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi	4%	1%
12	Isu menghasilkan perubahan kebijakan	2%	2%
13	Isu menghasilkan regulasi baru	6%	3%
14	Isu mendorong lahirnya stabilitas negara dan kesetaraan politik, terwujudnya hak asasi manusia, meningkatnya <i>political awareness</i> , meningkatnya kesejahteraan sosial dan/atau demokrasi	2%	7%
15	Isu mendorong terwujudnya program, strategi, atau kebijakan	5%	3%
16	Isu mempengaruhi terwujudnya tuntutan masyarakat dalam proses politik	3%	10%
17	Lain-lain	10%	9%
18	Kombinasi dari kategori-kategori di atas	5%	5%
TOTAL		100%	100%

**Tabel 18 Penyebab Kegagalan
dalam Mengubah Isu Prioritas menjadi Isu Publik**

NO	Penyebab Kegagalan dalam Mengubah Isu Prioritas menjadi Isu Publik	Aktor Dominan (%)	Aktor Alternatif (%)
1	Komersialisasi dan Fragmentasi Media	0%	2%
2	Adanya dominasi aktor yang lebih kuat	1%	11%
3	Tingkat Pendidikan aktor yang menghambat aktor untuk mengelola isu prioritas	4%	4%
4	Terbatasnya dukungan dari masyarakat luas karena isunya dianggap sensitif/tidak populer	0%	0%
5	Terbatasnya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, partai, institusi, dan/atau figur lain	28%	19%
6	Terbatasnya kapasitas dan performa institusi/birokrasi (tidak efektif, tidak efisien, gagal, dan sebagainya)	8%	5%
7	Apatisme	1%	2%
8	Terbatasnya kapasitas "sosialisasi" isu, baik karena minimnya basis sosial, jaringan, dan/atau kemampuan berkomunikasi	3%	4%
9	Perbedaan/gap kultural (etnis, agama, suku, ras)	2%	1%
10	Ketidakmampuan mengelola konflik	3%	2%
11	Keterbatasan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik	4%	13%
12	Rintangan geografis	1%	0%
13	Munculnya kesadaran demokrasi, meningkatnya inklusi politik dan "political awareness"	5%	1%
14	Konflik politik	9%	5%
15	Keterbatasan kapasitas aktor	5%	4%
16	Aktor terlibat skandal politik (kekerasan, korupsi, dsb)	3%	2%
17	Persoalan memilih isu prioritas dan/atau strategi gerakan, serta pendekatan kepada masyarakat	2%	4%
18	Lain-lain	12%	8%
19	Kombinasi dari kategori-kategori di atas	10%	10%
	TOTAL	100%	100%

Tapi penting untuk dicatat bahwa populisme tidak ada kaitannya dengan, dan belum tentu berujung pada, model akuntabilitas yang bersifat demokratis. Sementara para pemimpin populis tidak bisa menghindari dari menawarkan program-program politik yang sesuai dengan keinginan rakyat kepada para pemilih, tindakan tersebut belum tentu akan berujung pada proses dan upaya menghasilkan kebijakan yang baik dan sesuai dengan keprihatinan public. Hasil survei mendukung argument tersebut dengan dua cara. Pertama, mengiringi kemunculan populisme adalah kegandrungan para aktor utama mengejar dan memperoleh kekuasaan politik. Walaupun perluasan dukungan merupakan factor utama, baik aktor dominan maupun aktor alternatif percaya bahwa menjadi pemimpin negara seperti kepala daerah dan anggota parlemen akan membuka peluang yang lebih luas bagi mereka untuk menempatkan isu yang berkembang di masyarakat menjadi agenda politik (lihat Tabel 19). Tampaknya alasan yang terpenting adalah posisi sebagai pemimpin negara memberikan kekuasaan politik dan otoritas; dan memiliki kekuasaan politik dan otoritas adalah tujuan utama. Kecenderungan ini tampak lebih jelas, terutama bagi para aktor dominan, ketika ditanya mengapa mereka mendatangi institusi, organisasi atau tokoh tertentu untuk mengungkapkan persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi dan memperjuangkan kepentingan yang mereka miliki. Persentase terbesar memilih agen-agen penghubung ini karena dipandang memiliki kekuasaan dan otoritas (lihat Tabel 21).

Tabel 19 Alasan Aktor menggunakan Lembaga Tata Kelola Urusan Publik dan Lembaga Representasi Demokratik Tertentu

No	Alasan	Aktor Dominan (%)	Aktor Alternatif (%)
1	Hasilnya cepat yang baik	13%	17%
2	Berdasarkan kalkulasi yang strategis	15%	18%
3	Memiliki teman di dalam institusi tersebut	4%	5%
4	Hanya institusi tersebut yang terbuka sementara yang lain tertutup	1%	2%
5	Institusi tersebut memiliki otoritas	27%	21%
6	Institusi tersebut memiliki pengaruh	16%	14%
7	Lobi dan kontak personal	0%	0%
8	Institusi tersebut terlembaga dan mengakar di masy.	1%	3%
9	karena tidak bisa diselesaikan secara personal tapi butuh lembaga	2%	2%
10	Institusi tersebut adalah kendaraan aktor	10%	5%
11	Institusi tersebut independen	2%	4%
12	Kepercayaan terhadap pemimpin informal	1%	2%
13	Institusi tersebut dianggap mampu menyelesaikan persoalan	2%	3%
14	lain-lain	6%	6%
TOTAL		100%	100%

Sebagai perbandingan hasil survei juga menunjukkan regulasi, kebijakan dan program pembangunan adalah indikator-indikator yang penting dalam keberhasilan upaya para aktor dominan mengubah isu menjadi keprihatinan publik. Tapi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan isu-isu kesejahteraan, yang menjadi isu publik utama seperti yang dibahas sebelumnya, hanya mencatat persentase yang kecil.

Artinya, hasil survei bisa mengatakan bahwa sekalipun menempati posisi sentral dalam demokrasi di Indonesia yang sedang menyaksikan kemunculan populisme, pentingnya kesejahteraan dalam isu publik dan memperluas dukungan politik baru berujung pada keberhasilan para aktor memperoleh kekuasaan politik ketimbang kebijakan yang baik dan relevan. Lemahnya orientasi dan debat kebijakan didukung oleh fakta kegndrungan para aktor utama untuk menjadi tokoh yang terkenal. Setidaknya menjadi terkenal dalam pengertian memperoleh liputan media dan menjadi bagian dalam debat publik masih menjadi tujuan penting dalam mengubah isu-isu yang berkembang di masyarakat menjadi keprihatinan bersama dan dalam memobilisasi dan mengelola dukungan (lihat Tabel 19 dan 21).

Kedua, seperti sudah dibicarakan sebelumnya, terdapat kecenderungan lain yang mengiringi kemunculan populisme dalam bentuk politik yang kian terpusat pada figur. Walaupun memiliki perhatian yang sama dengan publik dalam hal isu-isu kesejahteraan, tergantung pada dukungan yang lebih luas, bekerja dengan partai politik dan kelompok kepentingan dan harus menyediakan program-program politik yang sesuai keinginan rakyat, para aktor dominan khususnya lebih peduli pada karier politiknya. Para aktor dominan, seperti ditunjukkan lebih jauh disini, cenderung mengkombinasikan perhatian publik pada isu-isu kesejahteraan, arti penting dukungan politik dan keutamaan tawaran keuntungan berbasis kebijakan untuk kepentingan pribadinya menjadi pemimpin politik dan pejabat negara atau sekedar menjadi terkenal. Kecenderungan ini sepertinya menjelaskan mengapa para aktor

dominan lebih menyangkutkan diri pada sumberdaya ekonomi dan otoritas ketimbang, misalnya, terlibat dalam organisasi-organisasi yang demokratis. Sebab para aktor harus berpegang pada sumberdaya yang mereka miliki sendiri.

Karenanya, kemunculan populisme juga diringi oleh, dan tampaknya berujung pada, tampilnya sejumlah figur populer. Para figur populer lebih peduli pada upaya memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya, daripada membuka dan mengajak perdebatan tentang kebijakan. Penguatan sumberdaya dan popularitas pribadi membantu para figur populer mengejar tujuan utamanya, yakni menjadi gubernur, bupati atau anggota parlemen. Contoh tipikal politik yang bertumpu pada figur dapat ditemukan dalam yang dikenal akhir-akhir ini dengan “politik pencitraan” yang telah menjadi salah satu kosa kata politik yang paling sering dipakai. Politik pencitraan, kurang lebihnya, adalah praktik menumbuhkan, mengembangkan, mempromosikan dan kadang-kadang memanipulasi imej sendiri melalui berbagai macam media untuk menarik banyak dukungan politik.

D. Refleksi: Dari Stagnasi ke Transformasi Demokrasi dan Roadmap ke Depan

Argumen-argumen diatas, yang didasarkan pada temuan survei evaluasi demokrasi putaran ketiga mengindikasikan dengan jelas bahwa meskipun Indonesia tidak diurus oleh sekumpulan elit oligarki (seperti klaim para akademisi), tetapi Indonesia juga belum mampu menunjukkan dinamika demokrasi yang lebih berkembang.

Situasi hari ini adalah sebuah prestasi dimana kebebasan masyarakat sipil telah berkembang pesat, baik secara sektoral maupun geografis—yang ditandai dengan meluasnya organisasi masyarakat hingga ke pelosok Indonesia—yang mendorong stabilitas negara. Situasi ini sekaligus menggugurkan pandangan internasional yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dan stabilitas negara hanya dapat dicapai apabila dibangun institusi yang kuat. Akan tetapi di sisi lain Indonesia mengalami *kemandegan* dalam hal pemberantasan korupsi, dan penggunaan instrumen uang dalam proses rekrutmen politik. Secara umum, beberapa kemajuan besar terhadap kontrol populer dalam mengelola urusan publik berbasis pada kesetaraan politik.

Dengan kata lain, periode transisi menuju situasi yang lebih demokratis tidak tercapai. Yang terjadi adalah konsolidasi berbasis pada pencapaian—normalisasi. Tentu saja ini sebuah prestasi karena aktor-aktor berpengaruh di Indonesia telah ikut mengimplementasikan beberapa aturan main demokrasi seperti supremasi hukum, kebebasan sipil, sistem multipartai, pemilu yang jujur dan adil secara prosedural, desentralisasi, berkurangnya dominasi militer di legislatif, dan sebagainya. Sayangnya praktik implementasi “institusi demokrasi” tersebut tidak berkorelasi mendorong Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena elit telah mampu beradaptasi mengikuti aturan main demokrasi yang ada untuk memuluskan kepentingan mereka. Dengan demikian yang terjadi adalah stagnasi demokrasi di tengah situasi negara yang relatif stabil.

Stagnasi bukanlah situasi yang memuaskan bagi siapapun yang mengharapkan peningkatan kualitas representasi politik; misalnya dengan meng-*upgrade* Indonesia setidaknya seperti situasi ideal di India baru-baru ini, dimana orang-orang dari New-Delhi untuk berpartisipasi secara demokratis membentuk partai yang fokus pada pemberantasan korupsi “Partai Rakyat” (AAP). Hasilnya mereka berhasil meraup suara yang menakjubkan di pemilu dalam waktu singkat dan mendudukkan wakilnya di legislatif lokal.

Stagnasi juga bukan merupakan hasil yang diharapkan bagi mereka yang berpikir bahwa masyarakat sipil dan media dapat membuat perbedaan yakni mendorong demokratisasi. Hasil survei menunjukkan bahwa dibandingkan dua survei sebelumnya, organisasi masyarakat sipil (CSO) hari ini telah berkembang luas hingga pelosok Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa elit-elit di Indonesia juga turut membangun organisasi masyarakat sipilnya sendiri—untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu, studi-studi tematik dalam penelitian PWD ini menunjukkan bahwa media mainstream di Indonesia dimiliki oleh pebisnis kelas kakap dan pimpinan partai, sedangkan media sosial yang ada mampu memobilisasi orang untuk mengorganisasir dirinya namun belum mampu mendorong representasi demokratis. Survei ini juga mengkonfirmasi bahwa sebagian besar aktor pro-demokrasi terorganisasi dan tersebar dengan baik namun tanpa dukungan sosial dan finansial yang memadai. Memang benar bahwa survei ini mengindikasikan banyak aktivis-CSO yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif "go politics" dalam rangka mengontrol kinerja elit yang terorganisir. Akan tetapi, survei ini dan sejumlah studi kasus yang dilakukan PWD menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi dan konsolidasi berbasis pada persamaan kepentingan antar aktivis yang melakukan "go politics". Mereka melakukannya atas nama individual sebagai "pemimpin CSO" yang mencalonkan diri untuk menjadi caleg dari partai, atau menjadi anggota komisi, atau pemimpin saluran-saluran partisipasi bentukan pemerintah yang metodenya cenderung bersifat *top-down*, bukan dengan model rekrutmen politik dimana orang-orang yang ingin mencalonkan mesti mendaftar dari level paling bawah.

Tantangan dan Peluang

Survei ini mengidentifikasi dua hal positif; (1) kebutuhan para elit politik untuk menggabungkan karakter patronase dengan populisme dalam rangka memenangkan pemilu, dikombinasikan dengan (2) tumbuhnya keinginan untuk mendorong kebijakan yang mengarah pada pembentukan negara kesejahteraan "welfare state".

Studi-studi yang ada menunjukkan bahwa dua dinamika tambahan tersebut dapat mendorong aktor mengembangkan populisme dan ide soal negara kesejahteraan sebagai kendaraan untuk melakukan transformasi demokrasi. Dua faktor pendukungnya adalah; pertama, kesadaran kelas menengah dan kaum miskin untuk melawan terhadap korupsi. Kedua, pegiat demokrasi seperti serikat buruh, politisi, aktivis CSO mulai mempromosikan secara lebih luas kebijakan-kebijakan yang mendorong hadinya negara kesejahteraan di kalangan gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil.

Post-clientelism

Seperti sudah disebutkan dalam tiga kesimpulan di atas, survei ini mendukung argumen bahwa banyak elit politik di Indonesia, seperti di beberapa negara lain di bagian selatan (Manor 2013), sedang melakukan praktik yang mendorong praktik clientelism.

Kenyataannya, elemen patronase politik dan penggunaan instrumen survei kekerasan (seperti temuan survei putaran kedua tahun 2007, didukung oleh riset-riset para Indonesianis seperti van Kinken 2009) tetap ada. Bahkan perjanjian perdamaian dan rekonstruksi di Aceh telah disalahgunakan oleh pemimpinnya sendiri untuk mencari kekuasaan dan memuluskan kepentingannya sendiri. Mereka berkoalisi dengan musuh politiknya terdahulu untuk berbagi kekuasaan. Di sisi lain, para aktivis dan reformis Aceh tidak berdaya sementara simpatisan asing yang menaruh kepedulian terhadap Aceh hanya diam dan tidak berbuat apa-apa. (Törnquist, Prasetyo dan Birks 2011, dan Törnquist 2012 dan proses penerbitan).

Secara umum, populisme sedang berkembang di Indonesia, yang di dalamnya ada lebih banyak kalangan yang bisa memberikan suaranya tanpa adanya tekanan politik lagi. Meskipun masih ada problem soal populisme, tetapi dari sudut pandang demokrasi dapat dilihat bahwa populisme memberi peluang bagi pemimpin kharismatik dan media untuk menjangkau langsung masyarakat umum, dan menawarkan skema kesejahteraan sebagai sebuah solusi. Ketika hari ini para petani, pekerja perkebunan, dan nelayan dan kaum miskin kota dihadapkan pada persoalan penggusuran, penebangan hutan, perumahan, dan infrastruktur fisik, populisme bisa menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, skema ini juga digunakan untuk menarik kelas menengah perkotaan yang dihadapkan pada persoalan korupsi, kemacetan lalu lintas, dan ide-ide soal desain pembangunan kota yang ramah lingkungan.

Poinnya, para elit politik membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar klientelisme untuk memenangkan pemilu. Caranya dengan menawarkan skema populisme berbasis kesejahteraan melalui program-program pemerintah yang dikoordinasikan dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Para politisi berkepentingan untuk mengamankan posisinya, birokrat tentu mengamini karena skema ini lebih bersifat teknokratis. Media, LSM, dan aktivis menyediakan diri sebagai mediator dan mempromosikan figur populer. Sebagai mediator mereka berkesempatan memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus berkesempatan menegosiasikan kebijakan-kebijakan yang pro demokratis. Kerjasama antara CSO, kelompok gerakan sosial dan pemerintahan Jokowi adalah satu contoh bagaimana skema ini berjalan (Praktikno & Lay, 2013).

Studi yang ada menunjukkan bahwa terkadang media, CSO, dan figur-figur populer melakukan hal sebaliknya. Bahkan ketika populisme yang diimplementasikan oleh aktor-aktor dominan berorientasi pada kesejahteraan bukan berorientasi pada identitas kelompok yang sempit, tetap saja praktik patronase yang berorientasi pada kesejahteraan digunakan para elit politik. Populisme hanyalah instrumen tambahan di samping patronase dan bossism untuk meraih suara. Berita baiknya adalah terdapat peluang yang cukup besar terhadap munculnya transformasi politik. Akan tetapi hasilnya tergantung pada faktor-faktor seperti orientasi ideologis dari para aktor pembawa perubahan tersebut, kemampuannya memobilisasi, dan derajat penerimaan serta kepercayaan baik di kalangan CSO maupun secara masyarakat secara luas terhadap aktor tersebut.

Di sisi lain perlu diperhatikan juga bahwa kalangan kelas menengah juga mengembangkan gerakan masyarakat sipil yang menawarkan program menarik dan progresif dalam kampanye politiknya seperti yang terjadi di Bandung.

Sekali lagi, bahwa terdapat ruang yang cukup luas terhadap berkembangnya aksi progresif di negeri ini, dan hasilnya diindikasikan secara politis melalui kebijakan yang dihasilkan oleh para aktor/pemimpin perubahan yang progresif tersebut.

Merindukan negara kesejahteraan (Welfare State)

Temuan survei menunjukkan dengan cukup jelas bahwa tuntutan terhadap kebijakan "welfare state" semakin meluas di berbagai level dan kalangan—sejak jatuhnya orde baru yang cenderung berorientasi pada pasar, dan di kalangan masyarakat sipil yang mengandalkan pada kekuatan komunitas, termasuk kelas menengah yang peduli terhadap isu kesejahteraan sosial yang berdampak pada keluarga dan bisnisnya. Hal ini tercermin dari banyaknya dukungan terhadap inisiasi kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di berbagai daerah.

Di berbagai belahan dunia, seperti Skandinavia—yang mula-mula mengadopsi ide negara kesejahteraan—dan negara seperti Amerika Latin, India, dan Asia Timur—yang mengadopsi skema kesejahteraan, terlihat bahwa skema negara kesejahteraan memungkinkan munculnya satu tuntutan bersama diantara populasi yang memiliki latar belakang yang beragam.

Dalam kasus ini juga, ada banyak tipe hak-hak kewarganegaraan dan negara kesejahteraan yang masing-masing memiliki peluang baik secara ideologi maupun strategi untuk dibahas lebih lanjut dalam kacamata komparatif. Akan tetapi, ada satu fokus baru yang ditawarkan disini bahwa kebijakan kesejahteraan memiliki kaitan erat dengan tuntutan sosial dan ekonomi yang berkembang secara luas di masyarakat.

Kondisi yang Tidak Mencukupi?

Kekhawatiran yang muncul adalah anggapan bahwa Indonesia berbeda dengan negara-negara yang berhasil menggunakan skema negara kesejahteraan dan mengembangkan kebijakan sosial ekonomi yang berkesinambungan. Seperti yang dikatakan Polanyi (1994) *double movements against original of capital* dan komodifikasi dalam rangka membuat mekanisme pasar berjalan. Industrialisasi, serikat pekerja yang terorganisasi, yang mendorong publik membentuk gerakan yang lebih luas adalah model yang menjadi rintisan munculnya negara kesejahteraan di Scandinavia, dan model adaptasinya yang menggunakan perspektif liberal ataupun konservatif muncul di Inggris dan Jerman (Esping-Andersen 1990).

Namun apakah hal tersebut juga bisa diaplikasikan di Indonesia? Pada kenyataannya memang benar bahwa gagasan neo-liberal di negara-negara belahan selatan melahirkan perdebatan dan resistensi, dan seperti yang terindikasi melalui survei ini bahwa pada akhirnya pasar dan masyarakat sipil yang menolong dirinya sendiri menuju ke kesejahteraan padahal masyarakat pada umumnya mengharapkan bahwa negara dan politisi yang memiliki tugas mengelola hal tersebut. Jadi kekhawatiran yang muncul terhadap aplikasi gagasan welfare state di negara seperti Indonesia bukanlah tidak beralasan. Pembangunan ekonomi yang tidak merata, industrialisasi yang menghasilkan pebisnis dan kelas pekerja yang terfragmentasi, dan posisi istimewa yang didapatkan kelas menengah seperti kasus-kasus klasik yang pernah ada (Threborn 2012, Bardhan 2011).

Sederhananya, yang perlu dipertanyakan adalah apakah ruang yang diberikan bagi aktor progresif untuk beraksi melalui model populisme yang fokus memperjuangkan soal standar hidup ketimbang identitas, yang menginisiasi lahirnya kebijakan bercorak kesejahteraan benar-benar membuka peluang demokratisasi yang tidak *market driven*, dan mengedepankan persamaan sosial ekonomi serta mendorong pembangunan yang inklusif? Apakah ada yang dapat mengimbangi sejarah kelas sosial yang unik dengan ideologinya sebagai agen pemersatu untuk tidak hanya sekedar melakukan protes namun mendorong terwujudnya kebijakan sosial ekonomi bercorak kesejahteraan?

Pertama-tama, untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk melihat studi-studi tematik yang serupa yang menjadi pengalan para aktivis di lapangan. Indikasinya menarik, mereka menunjukkan bahwa kelas pekerja di Indonesia—meskipun tidak tersebar luas dan memiliki satu suara—seperti kasus klasik pada umumnya di negara modernisasi dan industrialisasi, akan tetapi mereka membawa peluang bagi munculnya aksi-aksi progresif yang mendorong pada kebijakan kesejahteraan.

1. Termasuk studi Törnquist sejak tahun 1980an yang membahas masalah para aktivis dan peluangnya untuk “go politics”. Studi tersebut diperbaharui melalui 120 in-depth interviews di berbagai wilayah di Indonesia, beriringan pula melalui kegiatan reference group PWD yang melibatkan para akademisi dan aktivis (terima kasih khususnya diberikan kepada Luky Djani, Osmar Tanjung, Surya Tjandra, dan Handoko Wibowo) dan para informan PWD selama survei ini berlangsung.

Perluasan Gerakan Anti Korupsi

Kelas menengah sering dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan saat mengakses pelayanan publik. Misalnya kongkong dalam pengadaan proyek ataupun pungutan liar dalam mengakses pelayanan publik. Sayangnya, isu korupsi tersebut tidak pernah menjadi konsen masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, hari ini, situasi pelan-pelan berubah karena semakin banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dan sosial, mereka menjadi peduli terhadap kesalahan tatakelola pelayanan publik yang ada. Sebagai studi pembandingan dalam praktik demokrasi liberal di negara bagian selatan, India telah berhasil secara meluas mendorong gerakan anti korupsi sebagai isu bersama yang tidak hanya menarik bagi kelas menengah namun publik pada umumnya. Terbukti dengan kemenangan Partai AAP yang mengusung sejumlah agenda anti korupsi. Hal yang terpenting adalah, hari ini demonstrasi di Indonesia sebagaian besar merupakan aksi perlawanan terhadap penggunaan instrumen politik dan negara untuk akumulasi kapital kelompok tertentu/perorangan. Seperti yang terjadi di India, di satu sisi ada regulator yang memiliki kewenangan mengatur kenaikan pajak yang berimbas pada kenaikan biaya produksi, dan di sisi lain terjadi perampasan hak publik atas tanah, hutan, dan sumberdaya alam termasuk pemukiman.

Lebih lanjut, pengusaha dan kelas menengah sebenarnya menyadari bahwa perampasan hak-hak publik dan konflik yang ditimbulkannya merupakan masalah bagi mereka. Di satu sisi mereka perlu berkompetisi secara internasional untuk menekan biaya produksi serendah mungkin (tidak hanya dalam urusan upah); dan di daerah-daerah lain seperti Surabaya, Solo, Jogjakarta, Bandung, Jakarta, Medan, mereka menyadari bahwa negosiasi dengan penduduk lokal adalah sebuah keharusan untuk meminimalisasi dampak buruk seperti kemacetan lalu lintas, banjir, kerusakan yang membuat kota tidak nyaman ditinggali. Contoh kasus terbaik untuk mengelola situasi tersebut adalah yang dilakukan rezim Jokowi di Solo dimana dukungan terhadap programnya tidak hanya datang dari kelas menengah namun juga dari masyarakat miskin yang menjadi "korban" pengelolaan tata kota.

Singkatnya, ada peluang lahirnya kesatuan antara kelompok-kelompok yang tercerai berai (terfragmentasi) untuk melawan korupsi dan pencurian yang terkait dengan tidak meratanya hasil pembangunan. Situasi ini membutuhkan kehadiran pimpinan dan institusi yang kuat. Sebagaimana yang terjadi di New Delhi, India baru-baru ini, dimana telah lahir demokrasi yang ekstensif dan kebutuhan pemenuhan hak sosial, yang kemudian digunakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan. Di Batang, Jawa Tengah misalnya, sekelompok petani gurem mengalami situasi perampasan tanah yang mengancam kehidupan mereka. Bersama-sama kelompok lain termasuk pengusaha dan kelas menengah, mereka bersatu melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meskipun gerakan ini mengalami kesulitan untuk bergabung di dalam partai politik yang progresif. Mereka mampu melawan bupati yang lama dan sekarang sedang merintis perbaikan kebijakan di bawah kepemimpinan bupati yang baru.

Praktek Neoliberalisme dan relasi kelas pekerja

Selain isu sektor bisnis yang tidak teregulasi dengan praktek pekerja informal di dalamnya yang terlanjur dominan, dan keberadaan pekerja rumah tangga serta wiraswasta ukuran kecil, praktik ekonomi neoliberal makin membutuhkan relasi pekerja-pemilik usaha yang fleksibel dan informal, termasuk praktek alihdaya. Di sini termasuk juga sektor modern dan berbasis pengetahuan (*knowledge-based sector*). Dalam konteks keterbatasan kejelasan

tentang siapa itu pemilik usaha (*employers*), makin banyak orang yang kembali berharap pada Negara dan terlibat dalam politik untuk mendapatkan upah minimum dan keamanan social. Hal ini terjadi khususnya pada buruh alihdaya, buruh harian, pengusaha kecil dan pekerja rumah tangga (yang jumlahnya cukup signifikan dalam angkatan kerja). Ada kecenderungan mereka makin memperhatikan kinerja Negara dan politik apabila dibandingkan dengan sektor lain seperti buruh kontraktor bangunan, patron dan organisasi mandiri berbasis masyarakat sipil. Situasi kebutuhan pada Negara juga terjadi pada para pengusaha khususnya dalam rangka mengurangi upah minimum dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong bisnis mereka menjadi kompetitif di pasar global. Hal ini merupakan kecenderungan yang bersifat global, dan sekali lagi akan berguna bila kita bandingkan dengan situasi di India yang model pembangunannya cenderung mengarah pada neoliberalisme (e.g. Agarwala 2013).

Dinamika neoliberalisme yang terkait dengan praktek informalisasi yang diiringi dengan resistensi adalah factor krusial di balik praktek pembangunan yang berwatak populis, yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan indicator Negara kesejahteraan (seperti pelayanan dasar). Namun demikian tidak ada jaminan atas outputnya. Sebagaimana yang dipaparkankan oleh ilmuwan dan aktivis yang kritis, populisme dan skema-skema kesejahteraan yang ditawarkan dan yang sedang populer saat ini dapat dianggap sebagai upaya aktor dominan untuk mensosialisasikan ongkos penggunaan buruh dan peningkatan keuntungan, sekaligus menahan ketakpuasan massa (Chatterjee 2008).

Hal lain juga sama tidak meyakinkan untuk bisa terjadi, misalnya aktivis di Indonesia yang mencoba memajukan kualitas kehidupan orang biasa dan meningkatkan kapasitas politik mereka dalam kerangka populis seperti yang ditawarkan oleh Jokowi. Perspektif mereka ini mungkin mirip dengan yang terjadi di kalangan aktivis di India yang menuntut hak mendapatkan informasi, ketersediaan lapangan pekerjaan, kecukupan pangan, sebagai tambahan dari tuntutan pemerintahan yang baik, dengan cara bekerja sama dengan para politisi partai politik. Singkatnya, para aktivis ini dan para pemikir kritis ini mengargumentasikan bahwa berbagai kelompok kelas yang tercerai berai dapat dikumpulkan karena kesamaan jenis tuntutan yakni hal social dan keamanan ekonomi. Di saat yang sama, terbuka ruang bagi negosiasi dalam pembuatan kebijakan. Ketimbang menahan para pemprotes, cara populis ini dapat berguna bagi kelompok tertindas dan terpinggirkan di masyarakat.

Dari kesatuan tuntutan menjadi aksi bersama?

Bila proposisi ini diterima sebagai hipotesis yang penting dan menantang, bagaimana kita menjadikannya kenyataan? Pertanyaan yang paling kritis adalah siapa yang harus mendorong pembentukan tuntutan yang sama ini? Bukankah ada kecenderungan para pemimpin suka mengadu domba massanya yang juga sudah terpecah-pecah? Bukankah lebih sering terjadi kekuatan yang paling terorganisasi, yakni buruh, lebih akan memperhatikan dirinya sendiri (sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki terkait proses produksi di pabrik mereka masing-masing)? Bukankah juga sebuah fakta bahwa rekomendasi terhadap aktivis masyarakat sipil terkait dengan gagasan “go politics”, dalam rangka melindungi organisasi masyarakat sipil dari monopoli politisi busuk, telah mengalami kegagalan dan membawa implikasi yang tidak diduga bagi demokrasi di Indonesia? Bukankah juga benar bahwa rekomendasi susulan untuk membentuk blok politik (Samadhi dan Warouw 2009) antara di satu sisi masyarakat sipil yang fokus pada isunya sendiri (tapi terpecah-belah) dan serikat buruh, dan elit partai politik dan politisi, di sisi yang lain, hanya

menghasilkan koalisi sementara dan kontrak politik, yang setelah itu para pemimpin mereka kembali ke kehidupan dan urusan mereka masing-masing berbasis kepentingan mereka sendiri?

Kesemua hal di atas telah kita dengar, tapi ada satu hal kecenderungan terkini yang sedang terjadi dan kemungkinan akan menjadi titik balik sejarah. Salah satu studi tematik PWD (yang menindaklanjuti hasil survei) mengindikasikan bahwa bahkan serikat buruh yang solid pun telah kehilangan banyak anggotanya karena serangan proses 'informalisasi' relasi industrial dan alihdaya. Untuk tetap berdiri dan bertahan mereka membutuhkan memasukkan pekerja-pekerja yang lebih luas dalam agenda perjuangan mereka. Artinya, telah lahir kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan agenda bersama untuk mendesak peraturan alihdaya dan kontrak pekerja yang minimal, yang tidak hanya berguna bagi pekerja tetap, tapi juga kolega pekerja mereka yang tidak memiliki status tetap. Agar berhasil, mereka harus bisa mempengaruhi kebijakan dan terlibat dalam proses kebijakan politik di tingkat Negara. Ini kemudian membutuhkan gerakan massa dan pilihan dalam pemilu. Selain itu, para pekerja ini butuh untuk keluar dari kelompoknya sendiri untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan skema jaminan social. Kesemua skema itu sudah diurus oleh aparat Negara di berbagai tingkatan (Pemda). Sekali lagi, ada kebutuhan untuk memperluas aliansi untuk terus menjadi dukungan seluas mungkin.

Serikat buruh yang terorganisasi dan para pemimpin mereka telah menyadari hal ini khususnya dalam kasus FSPMI. Di awal tahun 2010 telah lahir aliansi luas antara serikat (KAJS), dengan sektor buruh informal (yang biasanya terfragmentasi), dan elemen masyarakat sipil, dalam mengawal proses legislasi, yang akhirnya diputuskan akhir tahun 2011 (lihat Cole 2012 and Tjandra 2013). Elemen masyarakat sipil merupakan elemen penting juga. Mereka memfasilitasi kerjasama antara elemen ini. Politisi progresif berorientasi populis yang memiliki kekuatan di DPR RI juga sama pentingnya. Kesemua ini telah ditindaklanjuti oleh panitia-panita susulan dan kerja-kerja konkrit untuk mengawal peraturan upah minimum dan aturan main ketenagakerjaan.

Bila kita lakukan perbandingan secara global, serikat-serikat ini dan para pemimpinnya telah mengambil langkah progresif seperti yang terjadi dalam gerakan serikat buruh di Brazil dan Afrika Selatan (meski hal ini bukan berarti mengabaikan kelemahan-kelemahan yang masih ada di serikat buruh Indonesia). Atau bila kita melihat balik pada sejarah dalam konteks kelahiran kelompok sosial demokratis di Scandinavia di tahun 1920an dan awal 1930an, kita bisa melihat beberapa hal: *pertama*, keputusan untuk menekan Negara untuk mengimplementasikan skema kesejahteraan universal, pendidikan, dan kebijakan industrial ditargetkan untuk semua kalangan, bukan untuk kelompok yang terbatas. Di dalamnya dilakukan pula pengembangan isu demokratis, kepentingan berbasis perwakilan dan berbagi kontrol di dalamnya, dan selanjutnya membentuk komunitas yang lebih luas dan secara ekstensi mendefinisikan isu publik. *Kedua*, penempatan serikat buruh berbasis kepentingan kolektif dan reformasi kesejahteraan universal dapat mendorong produktivitas, peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja (untuk detail analisa dan rujukan, lihat Stokke and Törnquist 2013).

Penutup

Adanya potensi baru akan kelahiran front (kesatuan) yang bersatu yang terdiri dari kelompok isu, kepentingan, dan gerakan yang selama ini telah terpinggirkan dalam proses kelahiran demokrasi.

Kerangka kerja yang digunakan dalam front tsb adalah populisme dan partisipasi berbagai stakeholder. Ciri para anggota stakeholder ini adalah kebutuhan untuk bernegosiasi pada kelompok miskin (yang kehilangan tanah dan standar hidup) dan menyediakan jaring pengaman sosial (khususnya untuk mereka yang kehilangan patron dan pekerjaan tetap). Proses ini, didorong oleh Jokowi, dapat bertransformasi menuju arah demokrasi dengan dipertukarkan pada pilihan dalam pemilu.

Proses tawar menawar ini bukan hanya sebatas masyarakat kesatuan yang luas yang melawan gerakan korupsi dan pencurian uang oleh aparat Negara. Proses ini lebih strategis lagi yakni melibatkan serikat buruh yang terorganisir, bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil yang progresif, dan politisi, terdiri dari banyak elemen seperti buruh, petani kecil, nelayan, PRT, dan masyarakat sipil sendiri. Front atau kesatuan ini akan mempengaruhi regulasi politik dan negosiasi dengan kelompok pengusaha dan politisi dalam rangka mendorong kebijakan yang mengkombinasikan keamanan sosial, ketersediaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks aturan main dalam pengorganisasian politik yang wataknya elitis dan eksklusif, front kesatuan harus lahir dari luar gedung parlemen dan proses pemilu, dan memiliki tuntutan untuk adanya perwakilan kepentingan mereka. Mereka inilah yang akan menghasilkan peta (roadmap) yang akan menjadi panduan untuk keluar dari stagnasi menuju transformasi demokrasi. Pembentukan ini bisa dilakukan di tingkat lokal dan nasional. Politisi progresif harus terlibat dan didukung, tapi hanya berbasis daftar prioritas gerakan di bawah ini dan bertanggungjawab pada mereka.

- Peluang orang biasa dengan rekam jejak demokratis (bukan berarti harus memiliki pendidikan formal) untuk menjadi calon, membangun partai dari bawah dan berpartisipasi dalam pemilu;
- Proses pelembagaan saluran untuk kelompok minoritas, dan kepentingan berbasis partisipasi melalui saluran perwakilan yang demokratis dalam mendorong kebijakan dan implementasinya; bisa juga memuat isu korupsi, peningkatan kepercayaan publik dalam kebijakan publik, dan mempromosikan gerakan dan organisasi demokrasi berbasis massa yang solid.
- Pengembangan kebijakan transformatif untuk isu perlindungan hak warganegara di bidang ekonomi, dan kesejahteraan. Dari pengalaman sebelumnya, hal ini dapat mendorong penguatan persamaan politik melalui penguatan kapasitas demokratis warga Negara, dan proses produksi yang berkelanjutan dan melahirkan lapangan pekerjaan.
- Penjajakan peluang mencari inspirasi dari kajian perbandingan di Negara lain dan upaya untuk mendorong kebijakan demokratis transformatif melalui tangki pemikir yang terdiri dari elemen akademisi yang peduli dan aktivis yang berpengalaman.

Sumber rujukan

- Agarwala, R. (2013) "Informal Labour, Formal Politics, and Dignified Discontent", Cambridge: Cambridge University Press.
- Aspinall, Edward & Gerry van Klinken (2011) "The State and Illegality in Indonesia", Leiden: KITLV.
- Bardhan, P. (2011) "Challenges for a Minimum Social Democracy in India" dalam 'Economic and Political Weekly', March 5. "EPW XLVI, no. 10: 39–43.
- Beetham, David, S. Bracking, I. Kearton, S. Weir (2002) "International Idea Handbook and Democracy Assessment", The Hague, London, New York: Kluwer law International.
- Beetham, David. (1999) "Democracy and Human Rights", Oxford: Polity Press.
- Budiman, Arief & Olle Törnquist (2001) "Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia" Jakarta: ISAI.
- Budlenders, Debbie (ed) (2011) "Budget Advocacy in Indonesia", Jakarta: IDEA, Inisiatif, lakspedam NU, Pattiro, Seknas, Fitra, IBP
- Caraway, T.L. and dan Ford, M. (forthcoming) "Labour and Politics under Oligarchy", in dalam Ford, M. and Pepinsky, T.B. Beyond Oligarchy? Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics.
- Chatterjee, P. (2008). "Democracy and Economic Transformation.", Economic and Political Weekly, April 19.
- Cole, R.P. (2012) "Coalescing for Change: Opportunities, Resources, Tactics and Indonesia's 2010–11 Social Security Campaign", BA honours thesis, Department of Indonesian Studies, The University of Sydney.
- Crouch, H. (1975–1976), General and Business in Indonesia, in *Pacific Affairs* 48 (4 Winter). Pp 519–540.
- Crouch, H. (1978)., "The Army and Politics in Indonesia", Cornell University Press.
- Diamond, Larry (1999) "Developing Democracy: Toward Consolidation", Baltimore dan London: The John's Hopkin University Press.
- Esping-Andersen, G. (1990) "The Three Worlds of Welfare Capitalism",. Cambridge: Polity Press.
- Guan, Lee Hock (2004) "Introduction: Civil Society in Southeast Asia" dalam Lee Hock Guan (ed) Civil Society in Southeast Asia. Singapore: NIAS & ISEAS
- Houtzager, P. P. & A. G. Lavalle (2009) "The Paradox of Civil Society Representation: Constructing New Forms of Democratic Legitimacy in Brazil dalam Rethinking Popular Representation, Olle Törnquist, Neil Webster, dan Kristian Stokke (Editor), New York: Palgrave.

- Jackson, K.D (1978). "Bureaucratic Polity: A theoretical framework for the analysis of power and communication in Indonesia", in K.D Jackson; L Pye (eds). *Political Power and communication in Indonesia*, California ., [etc.]: University of California Press.S
- Klinken, G. van (2009) "Patronage Democracy in Provincial Indonesia." In *Rethinking Popular Representation* , edited by Törnquist, O, Webster, W., and Stokke, K. (Editor) New York: Palgrave.
- Laksono, PM., S Sukamdi, Rik Habraken, Lau Schulpen (eds) (2013) "Local Civil Society Dynamics in Indonesia", Yogyakarta: Pusat Studi Asia Pasific & CIDIN Nijmegen University.
- Lauth, Hans-Joachim (2000) "Informal Institutions and Democracy in Democratization", Vol 7, No 4, (Winter) 2000, 21-50
- Manor, J. (2013) "Post-clientelist Initiatives" In *Democratisation in the Global South. The Importance of Transformative Politics*, Stokke, K. and Törnquist, O. (eds). New York: Palgrave, 2013.
- March, James G & Johan P Olsen (1989) "Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics", New York; Macmillan.
- Mietzner, Marcus (2012) "Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society", dalam *Jurnal Democratization* 19, No 2, hal 209-229.
- Mouzelis, Nicos (1998) "Modernity, Late Development and Civil Society" dalam *Democratization in the Third World. Concrete Cases in Comparative and Theoretical Perspective*, Lars Rudebeck, Olle Törnquist bersama Virgilio Rojas (eds), New York: Macmillan
- Polanyi (1944/1957/2001) "The Great Transformation: the Political and Economic Origins of Our Time", (Boston, MJA: beacon Press Paperback Edition 2001)
- Prasetyo, A. S., A. E. Priyono, and O. Törnquist, (with T. Birks), eds. (2003) "Indonesia's Post- Suharto Democracy Movement",. Jakarta: Demos.
- Pratikno and Lay, C. (2013). "From Populism to Democratic Polity. Problems and Challenges in Surakarta, Indonesia." In *Democratisation in the Global South: The Importance of Transformative Politics* , edited by Stokke, K. and Törnquist, O (Editor), Basingstoke: Palgrave, 2013.
- Priyono, A. E., W. P. Samadhi, and O. Törnquist (with T. Birks) (2013). "Making Democracy Meaning ful. Problems and Options in Indonesia",. Jakarta and Singapore: DEMOS and ISEAS.
- Raadt, Jasper, David Holladers, André Krouwel (2004) "Varieties of Populism: An Anlysis of the Programmatic Character of Six European Parties", Amsterdam: Vrije Universiteit.

- Robison, Richard & Vedi R Hadiz. 2004 (2004) "Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets", London: Routledge.
- Samadhi, W. P, and N. Warouw, (eds) (2009) ". Building Democracy on the Sand . Advances and Setbacks in Indonesia", a . Jakarta and Jogjakarta: DEMOS and PCD Press, (1 st ed.) December 2008;(2nd ed..).
- Stokke, K. and Törnquist, T. (eds) (2013), "Democratisation in the Global South. The Importance of Transformative Politics", . New York: Palgrave.
- Therborn, G. (2012), "Class in the 21st Century", *New Left Review* 78:5-29.
- Tjandra, S. (2013) "The Battle of Paradigms and the Indonesian Trade Union Movement", Unpublished paper, Atma Jaya Catholic University, Jakarta.
- Törnquist, O. (2012) "Democracy Bashing: On Corruption and Peace in Aceh.", *Jakarta Post* January, 27.
- Törnquist, O. (2013) "Assesing Dynamics of Democratisation: Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia. New York: Palgrave Macmillan.
- Törnquist, O. (forthcoming) "Aceh: Verandah of Lost Opportunities.", In *Building Peace in Aceh: Politics, Reintegration and Communities* , edited by Avonius, L., Vignato, S., and Grayman, J. (Editor)
- Törnquist, O., S. A. Prasetyo, and T. Birks (eds.) (2011) "Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction", 2st ed. Jogjakarta and Singapore: PCD Press and ISEAS.